

**PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) MUKTI  
JAYA DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN MASYARAKAT  
KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN  
KOTA SEMARANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Sarjana (S- 1)  
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

Oleh:

**DANY AULIYA FAHMI**

**1601046007**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Pengembangan  
Masyarakat Islam (PMI)  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Dany Auliya Fahmi

NIM : 1601046007

Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan/ Konsentrasi : Pengembangan Masyarakat Islam  
(PMI)

Judul : **Peran Badan Keswadayaan Masyarakat  
(BKM) Mukti Jaya dalam Pembangunan Lingkungan Masyarakat  
Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan  
Kota Semarang**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 Desember 2020

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan tata

Bidang Substansi Materi

Tulis



Sulistio, S.Ag., M.Si.

NIP. 19700202 199803 1005



Abdul Ghoni, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19770709 200501 1003



HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI

Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mukti Jaya  
dalam Pembangunan Lingkungan Masyarakat Kelurahan  
Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan  
Kota Semarang

Disusun Oleh:  
Dany Auliya Fahmi  
1601046007

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 29  
Desember 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna  
memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Sekretaris/Penguji II



Drs. H. M. Mudhofi, M.Ag  
M.Si  
NIP. 19690830 199803 1 001

Penguji III



Sulistio, S.Ag.,

NIP. 19700202 199803 1  
005

Penguji IV



Suprihatiningsih S.Ag., M.Si  
NIP. 19760510 200510 2 001

Dr. Agus Riyadi, M.Si  
NIP. 19800816 200710 1 003

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

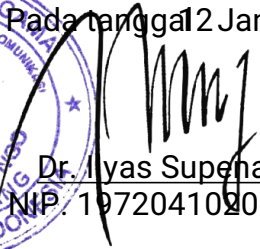
Sulistio, S.Ag., M.Si  
NIP. 19700202 199803 1 005

Abdul Ghoni, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19770709 200501 1  
003

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal 2 Januari 2021



  
Dr. Iyas Supena, M. Ag  
NIP. 19720410200112 1 003

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dany Auliya Fahmi

NIM : 1601046007

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya di jelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

2020

Semarang, Desember

Penulis

**Dany Auliya Fahmi**

**1601046007**

## KATA PENGANTAR

### Bismillahirrohmaanirrohiim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah swt yang menguasai alam semesta. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta sahabat dan keluarganya.

Tidak ada kata nikmat yang layak untuk diucapkan kecuali rasa syukur kepada- Nya, karena atas izin dan pertolongan- Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya peran serta bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih dan karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Waliaongo Semarang
3. Bapak Dr. Sulistio, S.Ag, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Pembimbing I, terima kasih atas segala waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, M.Si., selaku pembimbing Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

5. Bapak Abdul Ghoni M.Ag., selaku pembimbing II, terima kasih atas segala waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan PMI dan staf akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan pengalaman ilmu pengetahuan kepada peneliti.
7. Bapak Khodzirun S.Ag., dan Ibu Kistihastutik SH., penyemangatku, motivator terhebat, yang tidak henti- hentinya mendo'akan dan memberikan *support*. Rasanya ucapan terimakasih sangatlah tidak cukup, karena itu semua tidak akan bisa membalas jasa- jasa kalian sebagai orang tua teristimewa.
8. Teman sejatiku, Luthfiyatul Mukarromah, terima kasih atas waktunya yang selalu menemani, menyemangati, memotivasi dari awal berjumpa sampai akhir hayat, Aamiin. I love You.
9. Saudaraku Seperjuangan, M. Galih Abi, Fathu Rahman, Alan Mukafi, Ahmad Rifai, Wemby Singgang, Eko Prasetyo, A. Khoirun Naim, Raihan Abdul Ghoni, Nur Cholis Majid, Nawas Ainun N, Bahrul ulum, Anthoni Fajar K., teman- teman PMI A dan B angkatan 2016, terima kasih atas hiburan dan semangatnya.
10. Keluarga PP. Madrosatul Qur'anil Al- Aziziyah. KH Sholeh Mahali AH (Alm), Ibu Nyai Hj. Nur Azizah Gus Khotibul Umam, S.Pd.I, terima kasih untuk nasihat, ilmu dan barokah doa yang diberikan kepada penulis.
11. Abbah Joko Tri Abdul Haqq dan Keluarga besar Zawiyah Sawi Ngaliyan yang selalu mendo'akan dan memotivasi penulis.
12. Keluarga posko 4 KKN MIT IX Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Pak Hasan, Pak Rusman dan keluarga, Bu Mus dan keluarga, Salim, Naufal, Anggik, Rois, Lutfi, Widya, Putri, Anni, Alifia, Semil, Izza, Eka, Angki, lin, dan Abi terimakasih atas kenangan indahny.
13. Keluarga Masjid Al Muktarom Beringin Ngaliyan, Kang Suryadi

Mazaya, Bu Narti serta teman skripsi saya Ahmad Ghufron Faiz Acil S. Sos, terima kasih atas motivasi dan hiburannya.

Dan semua pihak yang telah membantu hingga terselesikannya skripsi ini.

Kiranya tidak ada harapan lain, semoga kebaikan kalian yang telah diberikan akan mendapat ganjaran dari Allah SWT. Dan dalam penyusunan skripsi ini jauh dari harapan sempurna, namun demikian semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi sesama. *Aamiin yaa Robbal 'Alamiin.*

Semarang, 29 Desember

2020

**Dany Auliya Fahmi**

## PERSEMBAHAN

Teruntuk Bapak Khodzirun S.Ag, dan Ibu Kistihastuti SH.  
Terima kasih telah menjadi orang terbaik di dunia ini, semoga Allah  
melimpahkan kasih sayangnya kepada kalian berdua, aamiin.

Adikku Nailalul Faty Syarifah (Alm)  
Teman Sejatiku, Luthfiyatul Mukarromah  
Sahabat dan teman seperjuangan

Tulisan sederhana ini saya persembahkan untuk membuat simpul kecil  
diwajah kalian.

## MOTTO

(يحب الله العامل اذا عمل ان تحسن (روه الطبراني

“ Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya  
dengan baik (H.R. At- Thabrani) ”



## ABSTRAK

### **“Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mukti Jaya dalam Pembangunan Lingkungan Masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”**

Dany Auliya Fahmi 1601046007

Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak hanya diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek atau pelaku pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan misi pemberdayaan masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mukti Jaya sebagai media belajar masyarakat untuk memecahkan masalah kemiskinan secara mandiri melalui pembangunan lingkungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mukti Jaya Dalam Pembangunan Lingkungan Masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan diskriptif. Peneliti memperoleh sumber data melalui objek lapangan penelitian yaitu BKM Mukti Mukti Jaya. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah koordinator BKM, anggota BKM, dan masyarakat. Analisis yang dilakukan menggunakan model Miles and Huberman yang dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mukti Jaya berperan dalam perencanaan, pengadaan dana dan sumber daya manusia. Pada tahap perencanaan pembangunan serta proses evaluasi, BKM ikut melibatkan masyarakat di dalam program NUSP 2018 seperti pembangunan jalan, drainase, sarana

prasarana dan mempercantik lingkungan.

Kata kunci : Peran BKM, Pembangunan lingkungan, Masyarakat.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Persembahan.....	vi
Motto.....	vii
Abstrak.....	viii
Daftar isi.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Dartar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II :KERANGKA TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Tentang Peran.....	17
B. Tinjauan Tentang Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	20
C. Tinjauan tentang Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).....	26

<b>BAB III : PERAN BKM MUKTI JAYA DI KELURAHAN</b>	
<b>MUKTIHARJO KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Desa Muktiharjo Kidul.....	35
B. Gambaran Umum BKM MUKTI JAYA.....	39
C. Peran BKM Mukti Jaya dalam Pembangunan Lingkungan Masyarakat.....	47
<b>BAB IV : ANALISIS PERAN BKM MUKTI JAYA DALAM</b>	
<b>PEMBANGUNAN LINGKUNGAN MASYARAKAT</b>	
<b>KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL.....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Peran Bkm Mukti Jaya Dalam Pembangunan Lingkungan Masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul.....	64
B. Analisis Hasil Peran Bkm Mukti Jaya Dalam Pembangunan Lingkungan Masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul.....	67
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
C. Penutup.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA DIRI**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembangunan menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan bernegara, melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terencana menjadi sebuah hal yang penting dalam keberlangsungan negara kedepannya. Tujuan dari pembangunan itu sendiri salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan tujuan pemerintah melindungi rakyatnya dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Pramana, 2013:582).

Menurut Soetomo, (2008:93) dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek dan aktor atau pelaku. Pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun non fisiknya (Pramana, 2013:586).

Meskipun pembangunan terus dilakukan namun kenyataannya masih banyak permasalahan yang meliputi kesejahteraan masyarakat yang belum terselesaikan. Tidak meratanya pembangunan antar desa dan perkotaan menjadi salah satu permasalahannya. Ketimpangan pembangunan antara desa dan perkotaan menjadi alasan tersendiri terjadinya urbanisasi. Urbanisasi akan mengakibatkan cepatnya pertumbuhan jumlah penduduk sehingga jumlah hunian semakin berkurang. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk tersebut harusnya diimbangi tata kota yang baik (Agus dkk, 2012:160).

Kondisi kota-kota di Indonesia yang berkembang dan berfungsi sebagai pusat-pusat kegiatan mengundang penduduk daerah sekitarnya untuk datang mencari lapangan kerja dan kehidupan yang lebih baik. Mereka yang bermigrasi ke perkotaan relatif meningkat dari tahun ke tahun. Mereka ini berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda dan sebagian dari mereka datang tanpa tujuan yang jelas (Direktorat Jendral Cipta Karya. 2010).

Ketidaksiapan kota dengan rencana sistem perkotaan guna mengakomodasi perkembangan kegiatan perkotaan dalam sistem rencana tata ruang kota dengan berbagai aspek dan implikasinya termasuk di dalamnya menerima, mengatur dan mendayagunakan pendatang. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya aktivitas yang sangat heterogen dan tidak dalam kesatuan sistem kegiatan perkotaan yang terencana, akibatnya munculah permukiman yang berkembang di luar rencana sehingga terbentuklah permukiman-permukiman kumuh (Koyoga, 2015: 2).

Pembangunan sistem perkotaan memiliki sebuah tantangan yang dialami, baik dalam proses tahapan, perizinan, maupun partisipasi masyarakat Menurut Lin Herlina, (2003:4) keuntungan lain dari partisipasi masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dalam pengertian meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mereka mampu berinisiatif sendiri dan mempengaruhi proses dan hasil pembangunan, meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka mampu mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan proyek pembangunan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas proyek.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan pemukiman yaitu

peningkatan kualitas pemukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya pemukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan.

Dalam laporan Jenderal Cipta Karya Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha<sup>3</sup> pemukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan pemukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran. Tujuan dari program KOTAKU ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan (Direktorat Jendral Cipta Karya, 2016).

Direktorat Jenderal Cipta Karya berinisiatif dan meresmikan pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015- 2019. Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan pemukiman kumuh dalam mewujudkan pemukiman layak huni di antaranya adalah melalui peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

BKM salah satu lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan, dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif. Menurut Kusumo, BKM pada prinsipnya adalah wadah sinergis masyarakat bagi orang- orang yang peduli terhadap permasalahan kemiskinan di komunitasnya. Dalam melaksanakan misi pemberdayaan masyarakat, BKM menumbuh kembangkan kelompok- kelompok swadaya masyarakat sebagai

media belajar masyarakat untuk memecahkan masalah kemiskinan secara mandiri. Fungsi BKM adalah sebagai wadah sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Badan ini memfasilitasi kebutuhan dari kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang ada atau masyarakat miskin pada umumnya untuk dapat terus tumbuh, berkembang jaringan usahanya dan meningkatkan perekonomiannya (Wijayanti, 2004).

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam lebih tepat menggunakan bentuk *da'wah bi al-hal* karena lebih menekankan aspek pelaksanaan suatu program kegiatan. Ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat berkaitan erat menyangkut perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan. Prinsip pembangunan masyarakat Islam adalah holistik dan mempedulikan semua aspek kehidupan, eksistensi komponen alam termasuk lingkungan bukan hanya manusia. Pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya merubah masyarakat tradisional, miskin, terbelakang dan tidak beriman menuju masyarakat modern yang maju, kreatif, beriman dan bertakwa. Namun kenyataan yang ada di lapangan kebersihan lingkungan masih menjadi masalah karena sebagian masyarakat masih ada yang berperilaku tidak ramah lingkungan (Kamaludin, 2014:02). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Qs. Ar Rumm ayat 40

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ  
مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ ۗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.” (Departemen Agama RI, 2002: 408)

Pada ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa, mengharapkan seorang muslim dapat menyadari pentingnya menjaga serta melestarikan alam lingkungan, dan juga tidak membuat kerusakan terhadap alam lingkungan. Dengan artian jika akan melakukan sesuatu harus melalui pertimbangan pemikiran yang matang akan akibat yang ditimbulkannya agar tidak terjadi hal-hal yang sifatnya merusak lingkungan.

BKM disini bertindak bukan hanya sebagai wadah aspirasi masyarakat saja, namun jika dikaitkan dengan dakwah, BKM juga melaksanakan dakwah bil hal yaitu dengan mengajak masyarakat untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan baik dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang lebih baik.

Pada pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh melalui Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* (NUSP) tahun 2018 maka perlu disusun Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan (*Neighborhood Upgrading Action Plan*–NUAP) Kelurahan Muktiharjo Kidul Tahun 2015- 2019. Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan Tahun 2015- 2019 Kelurahan Muktiharjo Kidul ini disusun secara partisipatif oleh warga masyarakat dengan fasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mukti Jaya dan didukung oleh Pemerintahan Kelurahan Muktiharjo Kidul. Kelurahan Muktiharjo Kidul sebagai salah satu lokasi sasaran program NUSP 2018 di Kota Semarang memiliki kawasan/lingkungan permukiman kumuh seluas 13,76 Ha<sup>3</sup> yang akan ditingkatkan kualitasnya melalui program/kegiatan NUSP 2018.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis, dengan wawancara kepada ibu Mujdiwati selaku anggota Unit Pengelola Lingkungan (UPL) BKM Mukti Jaya. "Kelurahan

Muktiharjo Kidul merupakan daerah yang padat penduduk dan rawan banjir yang disebabkan karena adanya peninggian jalan akibat pembangunan, saluran yang ukurannya terlalu kecil dan elevasi dasar saluran atau kemiringan yang sudah berubah". Penulis mendapati masyarakat ikut berkontribusi dalam hal pembangunan, yaitu di wilayah RW X, RW XIII, dan RW XXIII dengan perbaikan kualitas jalan berupa peninggian dan peningkatan kualitas permukaan jalan paving serta perbaikan drainase tertutup, sehingga tidak banjir lagi. Sarana prasana guna menunjang kreativitas masyarakat terlihat dengan kegiatan menghias lingkungan dengan mendorong masyarakat untuk mempercantik daerahnya dengan swadaya penghijauan seperti memasang pot- pot tanaman di atas saluran yang tertutup, sehingga lingkungan menjadi asri, hijau dan tidak gersang. Selain itu, warga juga berkreasi dengan membuat lukisan mural 3D (tigadimensi) di dinding rumah warga yang tidak hanya menggunakan cat tetapi juga dengan menambahkan semen dan pasir sehingga lukisan menjadi lebih hidup. Kemudian dengan adanya penanganan infrastruktur masyarakat berdampak juga pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, melihat dengan adanya hal ini penulis tertarik untuk melakukan penulisan tentang Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mukti Jaya Dalam Pembangunan Lingkungan Masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan dicari pemecahnya adalah Bagaimana Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mukti Jaya Dalam Pembangunan Lingkungan Masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

### C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mukti Jaya Dalam Pembangunan Lingkungan Masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Penulisan ini diharapkan memiliki manfaat, baik bagi pihak penulis maupun bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan secara akademik. Secara lebih rinci penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambah wawasan teorik bagi mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam dalam bidang pembangunan lingkungan.
- b) Penulisan ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan penulisan serupa dimasa mendatang tentang pemberdayaan masyarakat islam dalam bidang pembangunan lingkungan.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam hal ini Kementerian Perumahan dan pemukiman untuk menjalankan Program perbaikan infrastruktur khususnya perncegahan permukiman kumuh.
- b) Menjadi bahan masukan bagi masyarakat dalam pelaksanaan program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mukti Jaya Dalam Pembangunan Lingkungan agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan berdaya guna.

### D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis juga mengacu pada referensi terhadap penulisan- penulisan sebelumnya. Selain sebagai acuan,

tinjauan pustaka ini juga untuk menghindari terjadi kesamaan terhadap penulisan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penulisan- penulisan sebelumnya di antaranya yaitu :

Pertama, Dedi Rianto Rahadi (2015), yang berjudul “Model Pengembangan Kampung sebagai Desa Inovatif (Studi Kasus Kota Palembang)”. Penulisan ini bertujuan mengembangkan model kampung sebagai desa inovatif, Obyek penulisan di kota Palembang dan metode penulisan yang digunakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penulisan menunjukkan dibutuhkan model pengembangan desa inovatif dengan pendekatan keunggulan kompetitif masing masing disetiap desa yang ada di kota Palembang. Kemiskinan sulit untuk dihilangkan tetapi dengan mengedapankan keunggulan masing- masing setiap kepala keluarga diharapkan masyarakat menjadi mandiri. Desa inovatif di kota Palembang dikembangkan pada desa- desa dengan tingkat kemiskinan paling tinggi yaitu Kecamatan Seberang Ulu I dengan model keterlibatan semua unsur terkait antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Didalam penulisan ini memiliki Persamaan fokus dan lokus penulisan yang penulis teliti yaitu pembangunan infrastruktur, penulisan Dedi riyanto berfokus terhadap model pengembangan desa inovatif melalui infrastruktur, sedang penulisan yang penulis teliti berfokus terhadap peran badan kewasembadayaan (BKM) masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.

Kedua, Andi Maya Purnamasari (2011), dengan judul “Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata Di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan”. Penulisan ini bertujuan mengidentifikasi cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Toddabojo melalui konsep pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Dengan produk wisata yang ditawarkan, maka arahan yang paling tepat adalah mengangkat karakter asli Kampung Toddabojo dalam strategi pengembangan produk wisatanya, dan kemudian

disusun kerangka pengembangannya, sehingga kegiatan pariwisata di Kampung Toddabojo dapat menjadi bentuk pariwisata yang berkelanjutan. Hasil penulisan ini mengangkat karakter asli Kampung Toddabojo dalam strategi pengembangan produk wisatanya, dan kemudian disusun kerangka pengembangannya berdasarkan produk wisatanya, sehingga kegiatan pariwisata di Kampung Toddabojo dapat menjadi bentuk pariwisata yang berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut peningkatan kualitas masyarakat harus menjadi perhatian utama, misalnya dengan melakukan pelatihan atau penyuluhan tentang cara menghasilkan nilai tambah dari produk pertanian dan peternakan, serta pelatihan terkait pengembangan pariwisata sehingga pada akhirnya mampu menciptakan produk produk kepariwisataan yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar internasional. Dalam penulisan yang dilakukan Andi memiliki persamaan tentang pembangunan masyarakat serta penggunaan metode penulisan kualitatif, sedangkan perbedaan dengan penulisan ini adalah fokus penulisan dimana Andi berfokus terhadap pemberdayaan masyarakat guna perkembangan pariwisata, sedangkan penulis lebih berfokus terhadap peran BKM dalam pembangunan Infrastruktur.

Ketiga, Mukhamad Mizan (2020) dengan judul "Perencanaan Partisipatif Pembangunan Manusia di Desa Karangtengah kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal". Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan dalam perencanaan pembangunan partisipatif pembangunan manusia di desa karangtengah. Metode dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori analisis milik Milles dan Huberman, yaitu analisis yang terdiri dari empat alur, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan

kesimpulan. Hasil penulisan ini adalah tahapan perencanaan partisipatif pembangunan manusia meliputi, Pertama, tahap persiapan. Kedua, Sosialisasi dari pemerintah desa ke masyarakat. Ketiga, Musyawarah dusun. Keempat, musyawarah desa. Penulisan ini memiliki metode penulisan yang sama yaitu kualitatif menggunakan teori analisis milik Milles dan Huberman, sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus penulisan dimana penulis berfokus terhadap peran BKM dalam pembangunan Infrastruktur.

Keempat, Muhtar (2012), dalam jurnal "Pengembangan Masyarakat dengan Memanfaatkan Aset Lokal" ini bertujuan mengembangkan aset lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pendekatan penulisan ini kualitatif (action research). Hasil penulisan menunjukkan: (masyarakat) kelompok yang tergabung pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)- Mlatirejo telah dapat mengembangkan pengolahan sumberdaya lokal: pembuatan criping pisang, ubi jalar, dan talas melalui teknologi sederhana. Yang belum dilakukan adalah pembuatan kompos dari kotoran ternak sapi/ kambing. Kelompok tersebut juga telah dapat melakukan aksi sosial: santunan anak yatim/piatu, pertemuan kelompok per- selapanan (35 hari) dan pencatatan atas kegiatan yang dilakukan/pengadministrasian, serta sekaligus penghimpunan dana dari oleh dan untuk anggota (masyarakat). Sementara itu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)- Sendangmulyo juga telah dapat melakukan pembuatan criping gadung dan pisang. Seperti pada Gapoktan, pembuatan kompos juga belum dapat dilakukan yang sebenarnya telah mendapat pesanan dari calon pengguna sekitar dua ton- an (menunggu musim hujan). Kegiatan sosial yang dilakukan antara lain mengantar berobat seorang warga yang stress (ke Rumah Sakit Jiwa Solo), pertemuan kelompok sebulan sekali, dan melakukan pencatatan terhadap kegiatan yang dilakukan. Penulisan yang dilakukan Muchtar memiliki persamaan fokus objek penulisan yaitu

pemanfaatan masyarakat, dan yang menjadi pembedaan mendasar dari penulisan penulis adalah objek penulisan serta fokus penulisan, dimana Muchtar melakukan penulisan yang berfokus terhadap upaya yang dilakukan masyarakat untuk memanfaatkan aset masyarakat, sedangkan penulis berfokus terhadap peran BKM dalam pembangunan Infrastruktur.

Kelima, Penulisan yang dilakukan oleh Nur Achla Chalia (2015). Yang berjudul *"Peran BKM dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kemandirian di Desa Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara"*. Penulisan ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Lokasi penulisan di Desa Pecangaan Wetan Jl. Panenan Pecangaan Wetan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini antara lain: observasi, wawancara, dokumentasi. Informan dalam penulisan ini adalah koordinator BKM, anggota BKM, kepala desa, KSM (UPK) dan masyarakat miskin. Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis interaktif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa (1) Model penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian melalui pemberdayaan. Pemberdayaan disini ialah meningkatkan skill masyarakat miskin dengan memberikan pelatihan - pelatihan. Diantaranya yaitu pelatihan komputer, menjahit, jamur merang, dll. Serta memberikan modalpinjaman bergulir bagi masyarakat ekonomi lemah. (2) Peran BKM dalam menanggulangi kemiskinandi Desa Pecangaan Wetan meliputi tiga bidang (Tridaya) yaitu bidang lingkungan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Bidang lingkungan seperti pembuatan saluran air, betonisasi, pavingisasi dll. Bidang sosial meliputi rehab rumah,bantuan jamban keluarga (WC). Bidang ekonomi yaitu modal pinjaman bergulir. Yang paling diunggulkan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat miskin yaitu modal pinjaman bergulir khususnya pada masyarakat ekonomi lemah. BKM di sini sangat berperan dalam menanggulangi

kemiskinan di Desa Pecangaan Wetan. Penulisan yang dilakukan Nur Achla memiliki persamaan fokus objek penulisan yaitu peran BKM, dan yang menjadi pembedaan mendasar dari penulisan penulis adalah objek penulisan serta fokus penulisan, dimana Nur Achla melakukan penulisan yang berfokus terhadap upaya yang dilakukan BKM untuk menanggulangi kemiskinan di desa Pecangaan, sedangkan penulis berfokus terhadap peran BKM dalam pembangunan Infrastruktur.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari fenomena untuk menentukan hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain.

### 2. Definisi Konseptual

Dalam penulisan ini penulis menggunakan definisi konseptual diantaranya :

#### a) Peran

Peran dalam penulisan ini menjelaskan tentang kedudukan dan upaya masyarakat dalam pembangunan lingkungan masyarakat baik melalui infrastruktur maupun budaya.

#### b) BKM

Dalam penulisan ini batasan yang menjadi pembahasan pembangunan lingkungan yaitu program pengembangan pembangunan lingkungan yang diselenggarakan BKM Mukti Jaya dan dikerjakan oleh masyarakat sekitar untuk

menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

### c.) Pembangunan Lingkungan

Dalam penulisan ini menjelaskan tentang Pembangunan lingkungan yang merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan.

### 3. Sumber Data

- a) Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung. Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara kepada pegawai Badan Keswadayaan Masyarakat Mukti Jaya Kelurahan Muktiharjo Kidul.
- b) Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti arsip - arsip, buku, laporan, jurnal, dokumen, foto dan lain- lain yang berkaitan dengan tema penulisan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data adalah :

#### a) Observasi

Sutrisno Hadi (1986) berpendapat bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi dapat digunakan apabila penulisan berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja dan gejala- gejala alam. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan observasi non partisipan dimana penulis hanya mengamati secara langsung keadaan obyek, tetapi penulis tidak aktif dan ikut terlibat langsung (Husaini, 2003:54).

Beberapa hal yang menjadi obyek observasi dalam penulisan ini, diantaranya mencangkup keadaan geografis dan kehidupan sosial warga Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, serta kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah). Metode pengumpulan data dengan tanya jawab antara penulis dengan informan atau sumber data. Tanya jawab yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penulisan. Sedangkan wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menanyakan apa saja dan pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh seorang informan (Arikunto, 2010:79)

Penulis melakukan wawancara secara langsung dari informan untuk memperoleh data mengenai peran BKM Mukti Jaya serta perubahan lingkungan masyarakat dengan bertanya langsung kepada warga masyarakat dan pegawai BKM Mukti Jaya yang menjadi partisipan, sehingga kemungkinan adanya manipulasi data bisa diperkecil.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang memiliki arti barang-barang tertulis (Arikunto, 2002:135). Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumentasi pendukung data-data penulisan yang dibutuhkan. Dalam penulisan ini pendukung data dalam hal tertulis atau dokumen diambil dari berbagai arsip-arsip,

serta juga melalui foto-foto kegiatan BKM Mukti Jaya bersama masyarakat.

## 5. Validasi Data

Penelitian Kualitatif perlu adanya teknik pemeriksaan untuk mengetahui dan menetapkan keabsahan data. Untuk mendapatkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu (Moleong, 2010:324). Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Adapun teknik yang digunakan oleh penulis untuk menguji objektivitas dan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi (Moleong, 2010:330- 331) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua jenis, yang pertama triangulasi dengan memanfaatkan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data hasil pengamatan, hasil wawancara juga dokumentasi yang penulis peroleh dari hasil penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan subjek penulisan partisipasi masyarakat maka hal tersebut akan dikemukakan di sini, menurut Bogan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2009:88)

Analisis data adalah sebuah proses mengurutkan data-data yang ada dan mengorganisasikan dengan pola kategori suatu uraian data dasar sehingga dapat ditemukan sebuah hipotesis kerja dan disesuaikan dengan data (Laxy,1991:3). Miles dan Huberman (1992) sebagaimana yang dikutip Imam Gunawan mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data, yaitu (1) reduksi data (*data reduction*); (2) penyajian/paparan data (*data display*); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) (Gunawan, 2013:210).

### a) *Data Reduction* (Data Reduksi)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, focus pada hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk pengumpulan data selanjutnya. Pada tahap ini penulis merekap hasil wawancara selanjutnya penulis pilah sesuai dengan model pengembangan masyarakat melalui BKM Mukti Jaya di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan.

*b) Data Display (Penyajian Data)*

Setelah data direduksi maka selanjutnya dengan mendisplaykan data. Penyajiannya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan ini maka akan mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan proses selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Pada tahap ini penulis menyajikan data yang berkaitan dengan model pengembangan masyarakat melalui BKM (Idrus, 2007:148)

*c) Conclusion Drawing (Penarikan kesimpulan atau verifikasi)*

Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Pada tahap ini penulis memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan model pengembangan masyarakat melalui BKM Mukti Jaya di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan.



## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Tinjauan tentang Peran

#### 1. Pengertian Peran

Peran ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya, seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran ( B a s r o w i , 2 0 0 5 : 1 1 0 ) .

Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam- macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan- kesempatan apa yang diberikan masyarakat k e p a d a n y a ( B a s r o w i , 2 0 0 5 : 1 1 2 ) .

Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan Perbuatan orang lain pada batas- batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang- orang sekelompoknya.

#### 2. Cakupan Peran

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peran itu mencakup t i g a h a l :  
a) Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan k e m a s y a r a k a t a n .

- b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai o r g a n i s a s i .
- c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai peri kelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007:218).

### 3. B e n t u k d a n M a c a m P e r a n

Ada beberapa peranan sosial yang menuntut persyaratan. Persyaratan perilaku yang sangat terperinci dan pasti. Sebagai contoh, banyak sekali peranan- peranan jabatan atau pekerjaan yang tidak selalu mengikuti interpretasi individunya karena pekerjaan- pekerjaan itu harus dilakukan dengan cara yang sama oleh siapa saja yang dapat menjabat posisi pekerjaan tersebut. Misalnya saja peranan- peranan untuk para pegawai negeri dan pelajar yang kesemuanya telah ditata dengan baik. Tetapi ada pula beberapa peranan lain yang tidak harus mengikuti ketentuan, tetapi lebih banyak tergantung pada penafsiran individu itu sendiri seperti misalnya peranan teman, istri, orang tua atau orang- orang y a n g s u d a h p e n s i u n .

Dalam melaksanakan suatu peranan tertentu kita harapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara- cara yang sesuai dengan yang merekaharapkan keadaan semacam ini disebut sebagai *prescribed role* (peranan yang dianjurkan). Tetapi adakalanya orang- orang yang diharapkan ini tidak berperilaku menurut cara- cara yang konsisten dengan harapan - harapan orang lain mereka masih bisa dianggap menjalankan

peranan yang diberikan oleh masyarakat walaupun tidak konsisten dengan harapan- harapan si pemberi peran ( S o e m a r d i , 1 9 6 4 : 7 6 )

Keadaan seperti ini disebut sebagai *enacted role* (peran nyata) yaitu keadaan sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Peran nyata ialah pola- pola perilaku yang betul- betul dilaksanakan oleh para individu dalam menjalankan peran mereka. (Soemardi, 1964:80)

Menurut Soekanto Soerjono, peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat- syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- a) Peran meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan- peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu- individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk melakukan kegiatan – kegiatan. (Soekanto, 2007:224)

Adapun macam- macam peran dibagi menjadi 3 yaitu:

#### (1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan kepada anggota atau kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

(2) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

(3) Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi- fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

**B. Tinjauan Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

**1. Pengertian Pembangunan Lingkungan**

Pembangunan sebagai suatu "proses" pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (*growth*) ataupun perubahan (*change*) dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya. Hal ini merupakan gambaran umum dari masyarakat luas (*society*).

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, pembangunan juga dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah. Pembangunan itu sendiri kepada usaha mencapai tujuan Bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini sesuai dengan hakekat Pembangunan Nasional, ialah Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia (Efendi, 2002:9).

Menurut Inayatullah (Agus Suryono, 2001: 1), pembangunan adalah perubahan menuju pola- pola masyarakat

yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai control yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Menurut Kleinjans yang dikutip dalam Agus Suryono (2001: 30) pembangunan adalah bukanlah sosial teknologi atau GNP, tetapi pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Stepanus Henryk) wawasan manusia, meningkatnya semangat kemanusiaan, dan suntikan kepercayaan diri.

Menurut Rogers dan Shoemaker (dalam Agus Suryono, 2001: 30), pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Pembangunan adalah modernisasi pada tingkat sistem sosial.

Menurut Teguh Yuwono (2001: 47) mengatakan bahwa "pembangunan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu keadaan yang di pandang lebih bernilai. Pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa atau perkembangan sosial ekonomi".

Konsep pembangunan menurut Rogers sendiri dalam Agus Suryono (2001: 132), pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Menurut Bintoro Tjokromidjojo dalam Khairuddin (2000: 47) perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber- sumber pembangunan (termasuk sumber- sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan- tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Menurut Albert Waterson yang dikutip dalam Khairuddin (2000: 47) perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

Sedangkan Menurut Bintoro Tjokromidjojo dalam Khairuddin (2000: 48), suatu perencanaan pembangunan adalah suatu usaha untuk :

- a) Melahirkan suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap.
- b) Melahirkan rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
- c) Melakukan perubahan demi terciptanya keseimbangan struktur ekonomi.
- d) Meluaskan kesempatan kerja.
- e) Meratakan hasil pembangunan ke segala arah.
- f) Membina lembaga- lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
- g) Meningkatkan kemampuan membangun secara bertahap yang didasarkan pada kemampuan nasional.
- h) Menjaga kestabilan ekonomi.

Menurut Undang- undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Pada dasarnya perencanaan digunakan agar kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional dapat berjalan secara sistematis dan terarah.

Tarigan (2006: 9- 10), mengemukakan pendapatnya mengenai manfaat dari perencanaan pembangunan, sebagai berikut :

1. Dapat mengantisipasi dampak positif dan dampak negatif dari perubahan tersebut dan dapat dipikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif.
2. Membantu atau memandu para pelaku kegiatan pembangunan untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di mana yang akan datang.
3. Sebagai bahan acuan pemerintah untuk mengembalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan pembangunan.
4. Sebagai landasan bagi rencana- rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana.

Menurut Raharjo Adisasmita (2006: 126), dalam mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat terdapat paling sedikit empat jenis strategi :

1. Strategi pembangunan (*growth strategy*)
2. Strategi kesejahteraan (*welfare strategy*)
3. Strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*responsive strategy*)
4. Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh (*integrated or holistic strategy*)

Adapun tujuan dalam pembangunan menurut Zamhariri (2008: 23), dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan.

2. Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh pemerintah setempat (yang bersangkutan), dunia usaha dan masyarakat umum.
3. Terlaksananya sejumlah investigasi dalam berbagai sektor.
4. Terlaksananya langkah- langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta.

Pembangunan Kelurahan  
 Dalam undang- undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa kelurahan dibentuk wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

Sedangkan dalam pembangunan Desa/ kelurahan hal ini teratur Pada pasal 21 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2007 tentang pendataan pembangunan Desa/Kelurahan yaitu pendayagunaan data program pembangunan Desa/Kelurahan diarahkan pada pemanfaatan data untuk pembangunan di Desa/Kelurahan dalam rangka mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan public, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan dan lembaga kemasyarakatan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2007 tentang pendataan pembangunan desa/kelurahan pasal 2 ayat 1 dan 2 sebagai berikut : Pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan bertujuan untuk mengetahui potensi sumber daya yang dimiliki Desa/Kelurahan dan kegiatan- kegiatan yang menyeluruh, lengkap, dan akurat.

Data program pembangunan digunakan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, dan kabupaten/kota untuk :

1. Mensinergikan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Desa/Kelurahan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam mengelola program pembangunan Desa/Kelurahan dan
3. Bahan kebijakan pengelolaan program pembangunan Desa/Kelurahan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembangunan merupakan aspek lingkungan. Lingkungan adalah satu hal yang penting untuk diperhatikan, karena lingkungan mencerminkan dan menggambarkan kondisi atau keadaan dalam suatu wilayah tertentu, sehingga dapat mencerminkan aktivitas, keperilakuan masyarakat dalam wilayah tersebut. Pembangunan dan lingkungan memiliki hubungan yang berkaitan, timbal balik dan memiliki interaksi yang sangat erat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pembangunan dapat mempengaruhi lingkungan dan lingkungan pun dapat mempengaruhi pembangunan serta keduanya saling berkaitan dan saling berhubungan ([182746- ID- implementasi- pembangunan- berkelanjutan- b VCTvpAF.pdf](#) di akses pada tanggal 7/12/2020/23:00).

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*Power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan terlepas dari

keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi- sosial, karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. (Suharto, 2005:57).

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dari tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam membangun masyarakat, memberdayakan rakyat masyarakat, termasuk individu- individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas- tugas kehidupannya.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka

memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

- b) Menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang- barang dan jasa- jasa yang mereka perlukan.
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 1997:21).

## C. Tinjauan tentang Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

### 1. Pengertian BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat disingkat BKM merupakan lembaga yang dibentuk sebagai kepanjangan tangan atau pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. BKM dibentuk melalui pemilihan umum secara bertahap dimulai dengan tingkat basis/lingkungan sampai pemilihan tingkat Kelurahan atau Desa yang dipilih dari orang yang baik di lingkungannya masing- masing (basis). BKM bertugas merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kegiatan tersebut meliputi bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial.

BKM sebagai institusi lokal yang dibentuk melalui program PNPM didesain sebagai institusi sukarela. Kusumo menyatakan bahwa BKM pada prinsipnya adalah wadah sinergis masyarakat bagi orang- orang yang peduli terhadap permasalahan kemiskinan dikomunitasnya. (Wijayanti.dkk:38) BKM adalah lembaga masyarakat (*Civil Society Organization*), yang pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat

untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (*civil society*), yang dibangun dan dikelola berlandaskan berbasis nilai-nilai universal (*value based*) (Tata cara Pembentukan Unit Pengelola (UP) BKM P2KP :1).

## 2. Tujuan BKM

BKM dibentuk sebagai lembaga pimpinan kolektif sebagai motor penggerak penumbuhan kembali *capital social* seperti solidaritas, kesatuan, gotong royong dan sebagainya. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan dalam menjalankan peran tersebut, BKM mengorganisasikan warga untuk merumuskan program jangka menengah tiga tahun dan rencana tahunan penanggulangan kemiskinan (Pedoman Teknis Tinjauan Partisipatif, PNPM Perkotaan, 2007) (dalam Wijayanti.dkk: 38).

BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif sebagai penggerak modal sosial untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah desa/kelurahan dengan tugas pokok sebagai berikut.

- a) Merumuskan kebijakan serta aturan demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.
- b) Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis dan pronangkis.
- c) Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan keputusan yang diambil.
- d) Memverifikasi penilaian yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana.
- e) Mengawasi terlembaganya nilai-nilai kemanusiaan dan

prinsip kemasyarakatan.

- f) Mewakili masyarakat untuk memberikan kontrol dan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
- g) Membangun kerjasama dengan pihak luar (Departemen Pekerjaan Umum).

### **3. Peran dan Fungsi BKM**

Menurut Soetomo (Wijayanti,2012:38- 39), Fungsi BKM ada dua:

- a) Fungsi ke dalam yaitu sebagai media partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
- b) Fungsi ke luar yaitu sebagai representasi masyarakat lokal dalam menjalin hubungan kerjasama dengan para stakeholder.

### **4. Proses Pembentukan BKM**

BKM beranggotakan warga komunitas yaitu diakui komitmennya, seperti perwakilan warga RT/RW, perwakilan organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok perempuan (PKK), toko masyarakat atau tokoh agama, unsur aparatur daerah misalnya LKMD, dapat berpartisipasi dalam BKM dalam kapasitas pribadi. Pimpinan BKM harus dipilih dari dan oleh anggotanya (Wijayanti.dkk:39).

### **5. Unit- Unit Pelaksanaan Tugas BKM**

Unit- unit pengelola ini diangkat dan diberhentikan oleh BKM melalui mekanisme rapat anggota BKM. Dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitasnya, tiap tahun unit- unit pengelola wajib mempertanggung- jawabkan semua kerja mereka kepada BKM di dalam rapat anggota tahunan BKM.

Unit- unit pengelola BKM antara lain :

a) Pengelola Unit Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan- kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya, baik yang berasal dari dana stimulan BLM, P2KP, maupun dari pihak- pihak lainnya yang bersifat hibah.

b) Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

Unit Pengelola Lingkungan adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk mengelola kegiatan dibidang pembangunan lingkungan perumahan dan pemukiman diwilayahnya. UPL bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan kampung, penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman, tata kelola yang baik (good governance) dibidang pemukiman, dan lain- lain.

c) Unit Pengelola Sosial (UPS)

Unit Pengelola Sosial adalah salah satu gugus yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan- kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan- kegiatan dibidang sosial. Peran UPS adalah mengimplementasikan tugas BKM dalam peningkatan peran sosial bagi masyarakat miskin, menggalang kepedulian, kerelawanan dan solidaritas sosial serta melembagakan nuansa pembelajaran melalui Komunitas Belajar Kelurahan/Desa.

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari- hari UPK, UPL, dan UPS merupakan unit mandiri dan dapat mengambil keputusan yang bersifat operasional selama tidak bertentangan dengan

keputusan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh BKM. Oleh sebab itu setiap unit pengelola wajib mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada BKM.

## 6. Tugas dan Fungsi UPK, UPL dan UPS

Secara umum tugas dan fungsi unit-unit pengelola BKM adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh BKM, sehingga potensi unit-unit pengelola adalah sebagai pelaksana operasional yang berkaitan dengan masing-masing tugasnya sesuai apa yang tertuang dalam PJM Projangkis. Secara rinci tugas masing-masing unit pengelola dijabarkan sebagai berikut :

### 1) Unit Pengelola Keuangan (UPK)

UPK berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM;
- b) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM ekonomi;
- c) Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, mengadministrasikan keuangan; dan
- d) Menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi UPK.

### 2) Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

Unit Pengelola lingkungan berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang lingkungan perumahan dan permukiman dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia;

- b) Mengendalikan kegiatan- kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia Pembangunan;
- c) Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan pemukiman yang lestari, sehat dan terpadu;
- d) Menggali potensi lokal yang ada diwilayahnya;
- e) Menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak- pihak lain yang mendukung program ekonomi UPL.

### 3) Unit Pengelola Sosial (UPS)

UPS berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang sosial dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia;
- b) Mengendalikan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia bidang sosial;
- c) Membangun/mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga/infokom;
- d) Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam Komunitas Belajar Kelurahan/Desa (KBK/D);
- e) Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santuan, beasiswa, sunatan massal, dll; dan
- f) Menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak- pihak lain yang mendukung program ekonomi UPS (Tata Cara Pembentukan Unit Pengelola (BKM P2KP :3- 4).

## 7. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan BKM/Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa bentuk yang diterapkan dalam masyarakat diantaranya :

- a) BKM dilatih merealisasi PJM Projangkis dan rencana Tahunannya dengan melakukan kegiatan pembangunan Tridaya (Sosial, Ekonomi dan Lingkungan) dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN.
- b) BKM dilatih melakukan kerjasama pembangunan dengan cost sharing (dana BLM/APBN dan dana dari Pemda, lembaga usaha, perorangan dan/atau lembaga masyarakat lainnya) melalui kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET).
- c) BKM dilatih merealisasikan PJM Projangkis dengan melakukan kemitraan dengan Pemda, lembaga usaha, perorangan dan/atau lembaga masyarakat lainnya melalui kegiatan "*Channeling*".

## 8. Kelompok Swadaya Masyarakat

Kelompok Swadaya Masyarakat yaitu kumpulan orang yang menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu adanya visi, kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama dalam penanggulangan kemiskinan, visi yang menjadi pemersatu.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berorientasi pada penanggulangan kemiskinan sehingga harus dipastikan warga miskin terdaftar dan terlibat dalam kegiatan kelompok dan merupakan penerima manfaat primer sebagai kelompok sasaran dari program-program yang sudah dikembangkan dalam PJM Projangkis. Manfaat yang dapat dirasakan dapat berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan kualitas hidup seperti kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan

ekonomi, permukiman dan lainnya.

Posisi KSM adalah independen, artinya KSM bukan bawahan BKM/LKM atau Unit Pengelola. Hubungan KSM dan BKM/LKM dan UP merupakan hubungan kemitraan, karena itu pengembangan KSM tidak boleh berorientasi semata-mata mengakses dana yang ada di BKM/LKM, KSM harus mengembangkan kegiatan mandiri atau mengembangkan akses sumber daya sendiri. Semua ini dilakukan agar KSM dapat menjadi kelompok pemberdaya baik bagi anggota KSM maupun masyarakat umum.

1) Prinsip- prinsip KSM

- a) Saling mempercayai dan saling mendukung
- b) Bebas dalam membuat keputusan
- c) Bebas dalam menetapkan kebutuhan
- d) Berpartisipasi nyata.

2) Peran dan Fungsi KSM

- a) Sebagai sarana proses perubahan sosial
- b) Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah
- c) Sebagai wadah aspirasi
- d) Sebagai wadah menggalang tumbuhnya saling kepercayaan
- e) Sebagai sumber ekonomi.

3) KSM Mandiri

Faktor- faktor yang menjadikan KSM Mandiri antara lain :

- a) Pembentukan KSM didasari dengan sukarela. Artinya bahwa anggota yang bergabung dalam kelompok tidak didasari dengan niat hanya ingin mengajukan bantuan pinjaman modal melainkan niat bergabung dalam KSM atas dasar kebutuhan untuk membangun kerjasama.
- b) KSM memiliki rencana kegiatan yang jelas berdasarkan visi yang telah disepakati bersama.

- c) KSM mempunyai jadwal pertemuan rutin dalam rangka membahas persoalan- persoalan yang terjadi diantara anggotanya serta membahas hal yang dianggap penting bagi anggota KSM, misalnya penguatan pengetahuan mengenai kesehatan, pendidikan, dll.
- d) Kelompok memiliki kesepakatan bersama tentang kepemilikan fasilitas yang diterima, kontribusi yang diberikan kepada kelompok, membangun tata aturan hak dan kewajiban dalam kelompok.
- e) Kemampuan kepemimpinan/kepengurusan kelompok, memfasilitasi aspirasi dan kebutuhan kelompok serta berjalannya mekanisme pemilihan pengurus.
- f) KSM bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan yang dilakukan baik dari sisi keuangan maupun pelaksanaan kegiatan.
- g) Adanya dana swadaya, kelancaran simpanan dan pengakaran kelompok terkait dengan kepemilikan kelompok.
- h) KSM mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan anggota dan kelompoknya.
- i) KSM mampu membangun jejaring dengan kelompok lain.



**BAB III**  
**PERAN BKM MUKTI JAYA DI KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL**  
**KECAMATAN PEDURUNGAN**

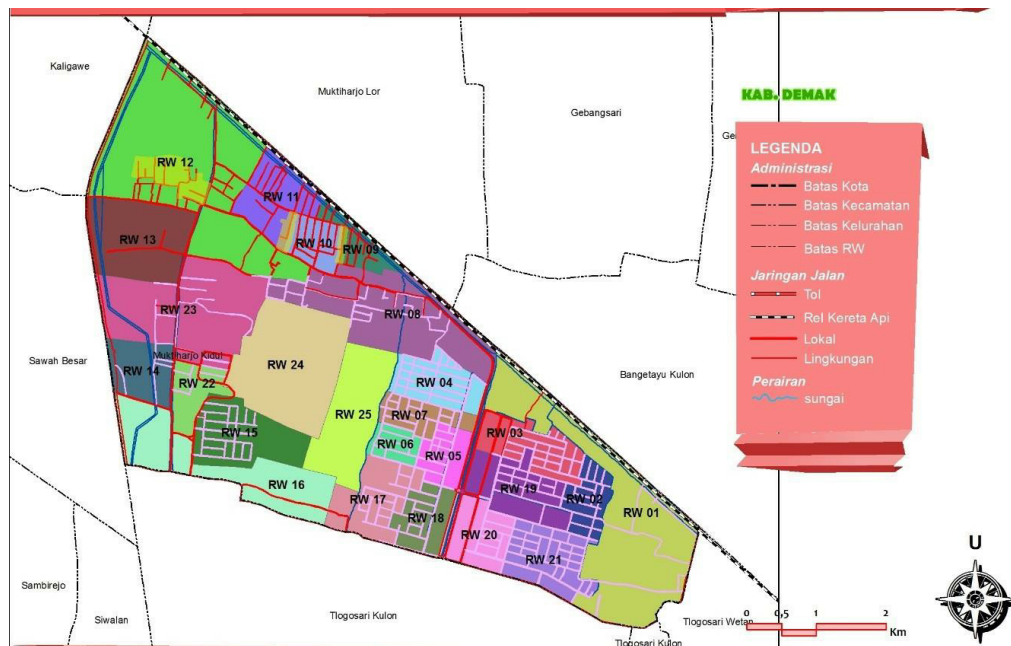
**A. Gambaran Umum Desa Muktiharjo Kidul**

**1. Kondisi Geografis**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011–2031 Kelurahan Muktiharjo Kidul merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang berada di Bagian Wilayah Kota (BWK), dimana sebagian peruntukannya adalah sebagai perumahan dan permukiman dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% dari luas lahan.

Kelurahan Muktiharjo Kidul merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kota Semarang yang terletak pada 6°96'26.60" – 6°98'18.61" Lintang Selatan dan 110°44'92.59" – 110°44'93.76" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara: : Kelurahan Muktiharjo Lor
- Sebelah Timur : Kelurahan Tlogosari Wetan
- Sebelah Selatan : Kelurahan Tlogosari Kulon
- Sebelah Barat: : Kelurahan Muktiharjo Kidul



Gambar : 3.1 Sumber: NUSP 18 Muktiharjo Kidul

Kelurahan Muktiharjo Kidul terbagi dalam dalam 25 RW dan 214 RT. Jumlah penduduk di Kelurahan Muktiharjo Kidul sebanyak 28.145 jiwa dari 7.922 KK dan 1.973 KK miskin. Luas wilayah administratif Kelurahan Muktiharjo Kidul sekitar 211,58 hektar. Dapat dilihat pada tabel :

**Tabel 3.1 Penduduk dalam Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	1.307	1.359	2.666
5 – 9	3.046	2.787	5.833
10 – 14	2.339	2.244	4.583
15 – 19	2.038	1.897	3.935
20 – 24	1.439	1.566	3.005
25 – 29	1.549	1.693	3.242
30 – 34	1.635	1.676	3.311
35 – 39	1.054	1.054	2.108
40 – 44	778	866	1.644
45 – 49	479	396	875
50 – 54	65	338	403
55 – 59	329	412	741
60 - 64	194	277	471
65 Keatas	55	127	182

Sumber Data : Profil Kelurahan Muktiharjo Kidul 2018

Sedangkan data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2 Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Perguruan Tinggi	5.811
2	Akademi	2.519
3	SLTA	6.395
4	SLTP	6.088
5	SD	2.515
6	Tidak Tamat SD	1.034
7	Belum Tamat SD	8.500
8	Tidak Sekolah	137
<b>Jumlah</b>		<b>32.999</b>

Sumber data : Profil Kelurahan Muktiharjo Kidul 2018

Berdasarkan data monografi Kelurahan Muktiharjo Kidul dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Muktiharjo

Kidul menurut pendidikan terakhirnya yang tertinggi yaitu lulusan SLTA atau sederajat yaitu sebesar 6.395 orang. Sedangkan yang terendah yaitu tidak tamat SD sebesar 1.034 orang. Penduduk yang masih berada di Perguruan Tinggi sebanyak 5.811 orang. Hal ini menggambarkan adanya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan di Kelurahan Muktiharjo Kidul secara tidak langsung berdampak pada tingkat ekonomi masyarakat yang salah satunya dapat dilihat melalui mata pencaharian penduduk. Berikut merupakan tabel mata pencaharian penduduk di Kelurahan Muktiharjo Kidul.

**Tabel 3.3 Penduduk berdasarkan mata pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Sendiri	89
2	Pengusaha	579
3	Buruh Tani	86
4	Buruh Industri	6.288
5	Buruh Bangunan	3.790
6	Pedagang	2.269
7	Pengangkutan	679
8	Pegawai Negeri + ABRI	3.880
9	Pensiunan	573
10	Lain-lain (Jasa)	7.172
<b>Jumlah</b>		<b>25.405</b>

Sumber data : Profil Kelurahan Mutkiharjo Kidul 2018

Berdasarkan data monografi Kelurahan Muktiharjo Kidul dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Muktiharjo Kidul menurut jenis kegiatan/ mata pencahariannya yang tertinggi yaitu bekerja sebagai Buruh Industri sebesar 6.288 orang. Sedangkan yang terendah yaitu bekerja sebagai Buruh Tani sebesar 86 orang.

### 3. Karakter fisik Kelurahan Muktiharjo Kidul

Karakteristik fisik wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul sebagian besar merupakan kawasan permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa/pelabuhan/perdagangan dengan kondisi topografi datar dan berada pada ketinggian rata-rata 3 meter di atas permukaan laut. Kawasan permukiman padat dan kumuh berada di hampir semua wilayah kelurahan.

Penggunaan lahan di Kelurahan Muktiharjo Kidul didominasi untuk pemukiman, yaitu seluas 161,66 hektar atau sekitar dari 76,41% dari total luas lahan yang ada. Selain lahan untuk lahan terbuka, penggunaan lahan untuk fungsi lainnya juga terdapat di Kelurahan ini antara lain untuk pemakaman, perdagangan dan jasa, industri, gudang dan perkantoran perkantoran, bangunan sekolah, serta fungsi- fungsi lainnya seperti dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 3. 4 Data Penggunaan Lahan**

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Perumahan/Permukiman	161,66	76,41
2.	Perdagangan / Jasa	9,80	4,63
3.	Taman dan Ruang	2,50	1,18
4.	Pemukaman	3,50	1,65
5.	Bangunan Sekolah	11,68	5,52
6.	Rawa	5,00	2,36
7.	Tempat ibadah	10,77	5,09
8.	Sarana Kesehatan	0,67	0,32
9.	Lainnya	6,00	2,84
	<b>Jumlah</b>	<b>211,58</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Profil Kelurahan Tahun 2018 dan hasil SKS

**Gambar 3.2 Peta Tata Guna Lahan**



Sumber : Data Profil Kelurahan Tahun 2018 dan hasil SKS

#### 4. Kondisi Sosial Wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Kidul berasal dari etnis/suku Jawa yang beragama Islam. Mata pencaharian utama penduduk di Kelurahan Muktiharjo Kidul sebagian besar adalah kaum buruh dan sebagian kecil diantaranya memiliki mata pencaharian sebagai PNS dan Pedagang.

Sarana sosial ekonomi yang memiliki fungsi sebagai tempat aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam wilayah perumahan dan permukiman yang terdapat di Kelurahan Muktiharjo Kidul antara lain berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, sarana ibadah, dan ruang terbuka atau taman, serta balai pertemuan warga. Di Kelurahan Muktiharjo Kidul terdapat sarana ibadah berupa 16 buah Masjid, 18 Surau/langgar, 4 Gereja, 1 kuil/vihara, sarana pendidikan berupa 5 buah gedung TK, 13 PAUD, 2 Paygroup, 6 buah gedung SD, 2 buah gedung SMP, sarana layanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit, , tempat praktek dokter 3 buah, 3 buah apotek dan pondok pesantren 2 buah. Hal ini dapat terlihat melalui table Berikut:

Tabel 3.5 Sarana Sosial Ekonomi

No.	Jenis Sarana Sosial Ekonomi	Jumlah	Satuan
1.	<b>Sarana Pendidikan :</b>		
	1. Sekolah Taman Kanak – kanak/paud/playgroup	20	Unit
	2. Sekolah Dasar	6	Unit
	3. Sekolah Menengah Pertama	2	Unit
	4. Pondok Pesantren	2	Unit
2.	<b>Sarana Ibadah :</b>		
	1. Masjid	16	Buah
	2. Surau / Musholla	20	Buah
	3. Gereja	4	Buah
	4. Kuil/vihara	1	Buah
3.	<b>Sarana Pelayanan Kesehatan :</b>		
	1. Puskesmas Pembantu	1	unit
	2. Tempat Praktek Dokter	3	unit
	3. Apotek	3	unit

Sumber : Data Profil Kelurahan Tahun 2018

## B. Gambaran Umum BKM MUKTI JAYA

### 1. Sejarah Berdirinya BKM MUKTI JAYA

Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini dirasakan perlu mendapatkan perhatian yang sangat mendasar untuk di tangani, khususnya di perkotaan. Apalagi dengan adanya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat biaya operasional industri menjadi tinggi, akhirnya sampai ke pengurangan ke hasil produk yang berimbas pada pengurangan tenaga kerja akibat daripada itu menjadikan kehidupan masyarakat bawah makin terpuruk.

Pemerintah melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa kumuh) telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah ini sehingga munculah kelembagaan masyarakat lokal secara partisipatif yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan ini di percaya sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diperuntukannya digunakan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan dan kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin dan badan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap komunitas masyarakat miskin.

Dalam menjalankan kegiatannya prinsip- prinsip yang harus di junjung tinggi, di tumbuh kembangkan dan dilestarikan oleh BKM “Mukti Jaya” Kelurahan Muktiharjo Kidul, adalah demokrasi dalam setiap penyampaian pendapat yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak terutama masyarakat miskin, maka mekanisme pengambilan keputusan di lakukan dengan cermat dan bijaksana berdasar azas keadilan dan kebersamaan.

Hasil beberapa kali diskusi dengan pihak- pihak terkait yang diselenggarakan forum BKM Kota Semarang disimpulkan bahwa, BKM yang menjalankan program pinjaman bergulir adalah Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga bila UPKnya masih ingin beroperasi atau beraktivitas setelah tahun 2017 maka harus berbadan hukum.

Upaya meningkatkan kemandirian juga sudah dilakukan dengan membentuk KSM- KSM sosial produktif yang hasilnya bisa meningkatkan kemampuan dan kemandirian organisasi BKM itu sendiri, para pelaku atau anggota KSM maupun masyarakat miskin di Muktiharjo Kidul. Dengan adanya kegiatan Rembug Warga Tahunan, merupakan cerminan komunikasi, kordinasi dan konsolidasi bersama untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu mensejahterakan warga lingkungan melalui program yang diupayakan bersama, saling percaya dengan landasan kerelawanan dari semua pihak tidak saja pada anggota pengurus BKM “MJ” tetapi pada semua elemen masyarakat secara umum yang didukung oleh Pemerintah dan lembaga sosial masyarakat lainnya yang ada di kelurahan muktiharjo kidul kecamatan pedurungan kota semarang.

Menurut Abdul Rozaq selaku Koordinator BKM Mukti Jaya menjelaskan

“Masa bakti 2018- 2021 merupakan periode ke IV, Sejak awal berdiri pada bulan Maret tahun 2000” (Wawancara peneliti dengan narasumber pada tanggal 27 November 2020).

Hal ini pula dijelaskan dalam hasil rapat anggaran Dasar dan

anggaran rumah tangga pengurus BKM Mukti Jaya periode 2018-2021 membuahakan surat keputusan No: 12/BKM- MJ/II/2018 tentang pengangkatan unit- unit pelaksana di BKM Mukti Jaya periode 2018- 2021 pada tanggal 06 februari 2018 menjadi landasan kegiatan dengan berpedoman Tata Tertib Pemilihan Pengurus BKM Mukti Jaya. Terdiri dari 8 komisi BKM, Satu Koordinator. Pengurus BKM dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu sekretaris, 3 unit pelaksana dan 3 dewan pengawas. (Data BKM Muti Jaya)

## 2. Struktur Organisasi BKM Mukti Jaya

Struktur organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mukti Jaya periode 2018- 2021, di catatkan dan disyahkan secara hukum di hadapan Notaris Masyhuri, SH,. di Semarang dengan Akta Perubahan No. 01 Tgl. 20 Februari 2018 BKM Mukti Jaya Kelurahan Muktiharjo Kidul, memiliki perangkat organisasi yang meliputi :

1. Pengurus
2. Anggota
3. Unit- unit pelaksana

Pengurus BKM Mukti Jaya terdiri dari seorang Koordinator merangkap anggota dan beserta Up- Upnya sebanyak 11 (sebelas )orang yang di lakukan melalui Rapat Anggota Tahunan BKM Mukti Jaya

Susunan pengurus BKM Mukti Jaya adalah sebagai berikut :

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| a) Koordinator       | : | Drs. Abdul Rozaq  |
| b) Komisi Ekonomi    | : | 1. Muhammad Muslimin<br>2. Ngandiyanto<br>3. Miftahul Amirin S.Pd |
| c) Komisi Sosial     | : | 1. Desy Bertha Senduk, STh<br>2. Saniyatun                        |
| d) Komisi Lingkungan | : | 1. Sutarto  |

2. Drs. Rochanuli  
 3. Joko Hariyono
- e) Kimatraan : 1. Ir. H Suwarno Widodo, Msi  
 2. Drs. Fahrudin

Unit Pelaksana:

Unit Pengelola Keuangan : Suwarti

Unit Pengelola Lingkungan : mudjiwati

Unit Pengelola Sosial : Laily Rachmawati

Sekretariat : Djumiati

Dewan pengawas : 1. H. Minanto

2. Najib, SE,MM

3. Susy Budi Nurbety, SE.

### 3. Tugas pokok dan fungsi

Bahwa dalam anggota pengurus BKM "Mukti Jaya" bersifat Kolegial dan dikoordinir oleh seorang Koordinator bersifat Managerial Koordinasi antar Komisi sebagai bentuk pertanggung jawaban Tugas Pokok dan Fungsi dalam Pengaplikasian Bidang yang ditangani,

1. Komisi Ekonomi mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan Ekonomi Produktif dengan pengembangan program berkelanjutan (Peningkatan kualitas SDM secara Ekonomi) misal: Perkoperasian, UMKM, KSM Produktif dan lain- lain – Mengupayakan Penyegaran Piutang sebagai pilar kesejahteraan masyarakat melalui program pinjaman bergulir
2. Komisi Lingkungan Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur diwilayah sesuai kebutuhan dengan skala prioritas bersama kelembagaan lainnya dimasyarakat
3. Komisi Sosial ( Produktif ) Program sosial produktif yang ada, secara aktif melakukan komunikasi, evaluasi dan pendampingan berkesinambungan pada KSM Sosial Produktif

4. Komisi Kemitraan, Koneksitas, Caneling dan Pemberdayaan masyarakat secara aktif mencari peluang program yang dapat diterapkan dilingkungan lokal dari berbagai pihak baik Pemerintah, BUMN, Swasta, Akademisi sebagai wujud pemanfaatan CSR, ( Misal: Pelatihan- pelatihan, Permodalan dan lain- lain)
5. Koordinator, monitoring semua agenda Komisi dan program untuk segera mengambil sikap kebijakan dan menangkap program secara umum yang kemudian di Konsolidasikan secara bersama pada Rapat Koordinasi ( Pleno anggota pengurus )
6. Sekretariat adalah wadah koordinasi dan konsolidasi sesuai bidang penanganan yang ada di BKM dengan dibantu oleh satu orang pelaksana secara administrasi.
7. Mempertanggung jawabkan secara lembaga pada program-program khusus yang dipercayakan kepada BKM.

Dengan demikian, BKM Muki Jaya berpotensi untuk bisa berkolaborasi dengan pihak pemerintah kota, swasta, kelompok peduli dan para pihak lain di wilayah setempat dalam rangka aktualisasi secara nyata prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan (Tridaya) yaitu kegiatan penanganan kumuh dan pencegahan meluasnya kumuh di perkotaan yang dilakukan secara komprehensif, antara penanganan fisik/infrastruktur, pengembangan ekonomi (*Local Economic Development*) dan kegiatan sosial (aturan bersama, perubahan sikap & perilaku, PHBS, dll). Untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan penanggulangan kemiskinan dan permukiman yang disepakati seluruh masyarakat setempat, baik dengan sumber dana KOTAKU maupun sumber dana lainnya (channeling), BKM perlu membentuk unit- unit pengelola sesuai kebutuhan, yang setidaknya terdiri dari: Sekretariat, Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Sosial (UPS).

### 1) Sekretariat.

Dalam upaya peningkatan pelayanan, perencanaan dan pengelolaan program BKM Mukti Jaya, kesekretariatan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting. Oleh karena itu kinerja kesekretariatan diharapkan dapat mengorganisasikan kepentingan pengurus dan UP- UP dalam menjalankan programnya. Adapun atas hasil rapat pengurus BKM Arta Kawula pada tanggal 06 Februari 2018 ditetapkan pengurus Sekretariat adalah : Djumiati.

### 2) Unit Pengelola Keuangan (UPK)

UPK akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan pinjaman bergulir, akses channeling ekonomi, dan akses kegiatan yang berkaitan dengan pemupukan dana atau akses modal masyarakat melalui Koperasi . Meskipun akses kegiatan yang berkaitan dengan pemupukan dana atau akses modal masyarakat sudah melalui Koperasi , namun dalam kinerja keorganisasian BKM, tugas UPK bersama- sama dengan kesekretariatan masih melakukan secara terus menerus / periode dengan melaporkan, mencatat kegiatan keuangan BKM.

Adapun atas hasil rapat pengurus BKM Mukti Jaya pada tanggal 06 Februari 2018 ditetapkan pengurus Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Keuangan : Suwarti

### 3) Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

UPL bertanggung- jawab dalam hal penanganan Rencana Perbaikan Kampung, Penataan dan Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman, Good Governance di bidang Permukiman, dan lain- lain. UPL diharapkan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta penjegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan

kegiatan – kegiatan pada entitas kelurahan, serta kawasan dan kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan social dan ekonomi untuk berkelanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik dilokasi permukiman kumuh. Adapun atas hasil rapat pengurus BKM Mukti Jaya pada tanggal 06 Februari 2019 ditetapkan pengurus Sekretariat adalah :

1. Mudjiwati

#### 4) Unit Pengelola Sosial (UPS)

UPS didorong untuk mengelola relawan- relawan dan hal-hal yang berkaitan dengan kerelawanan, mengelola pusat informasi dan pengaduan masyarakat ( termasuk media warga untuk sarana kontrol sosial ), penanganan *Good Governance*, penanganan kegiatan sosial, dan lain- lain sesuai kesepakatan masyarakat setempat. UPS berkewajiban menumbuhkan solidaritas serta kesatuan sisoal dalam menggalang kepedulian dan kebersamaan gerakan warga dalam menanggulangi kemiskinan dan permukiman secara mandiri dan berkelanjutan. Adapun atas hasil rapat pengurus BKM Mukti Jaya pada tanggal 06 Februari 2018 ditetapkan pengurus Sekretariat adalah :

1. Laily Rachmawati

#### 5) Dewan Pengawas

Dalam upaya melakukan penikaian dan pembinaan serta pelaksanaan fungsi- fungsi supervisi perlu dibentuk Dewan pengawas yang diharapkan dapat menjadi pengawas pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil program kegiatan BKM baik dan keuangan maupun kegiatan lainnya. Memperkuat kelembagaan BKM yang lebih baik. Adapun atas hasil rapat pengurus BKM Mukti Jaya pada tanggal 06 Februari 2019 ditetapkan pengurus Sekretariat adalah :

1. H. Minanto
2. Najib, SE,MM
3. Susy Budi Nurbety, SE

Oleh karena itu, Unit- Unit Pelaksana tersebut berkewajiban memberikan informasi dan laporan perkembangan dari masing- masing kegiatan yang menjadi tugas pokoknya, mengusulkan draft konsep pengembangan, serta memberikan pertanggungjawaban berkala maupun akhir kepada BKM. Termasuk juga memberikan saran- saran dan masukan- masukan secara profesional kepada BKM untuk menjadi dasar pertimbangan BKM dalam mengambil kebijakan maupun keputusan yang diperlukan.

#### **4. VISI MISI BKM MUKTI JAYA**

##### **a. VISI BKM MUKTI JAYA**

Masyarakat mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menanggulangi kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan

##### **b. MISI BKM MUKTI JAYA**

Memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya dan membudayakan kemitraan sinergis antara masyarakat pelaku pembangunan lokal lainnya.

#### **5. Nilai- Nilai BKM Mukti Jaya**

Di Dalam pelaksanaannya Bkm Mukti Jaya memiliki Nilai- nilai yang harus di junjung tinggi, ditumbuh kembangkan dan dilestarikan oleh semua anggota pengurus BKM Mukti Jaya adalah :

1. Dapat dipercaya semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan

BKM Mukti Jaya harus benar- benar dapat menjaga kepercayaan yang diberikan kepada Masyarakat maupun pemerintah untuk menerapkan aturan- aturan yang berlaku dengan baik dan benar

2. Ikhlas / kerelawanan : dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Program ,benar- benar berlandaskan niat ikhlas untuk turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di wilayahnya dan tidak mengharapkan imbalan materi, jasa, maupun mengutamakan kepentingan pribadi serta golongan atau kelompoknya.
3. Kejujuran : dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana serta pelaksanaan Program Kegiatan harus dilakukan dengan jujur sesuaikan kompetensi, sehingga tidak dibiarkan adanya upaya- upaya untuk merekayasa, memanipulasi maupun menutu- nutupin sesuatu, serta dapat merugikan masyarakat miskin serta menyimpan visi, misi dan tujuan BKM Mukti Jaya
4. Keadilan : dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan harus menekankan azas keadilan, kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin. Keadilan dalam hal ini tidak berarti sekedar pemerataan.

Sebagai pelaksanaan RWT tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2020, pengurus akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan selama tahun 2019 (periode Januari 2019 sampai Desember 2019) kepada masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan secara umum Program kerja tahunan yang telah di tuangkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) relatif dapat di laksanakan, hal ini terlaksana berkat terjalinnya kerjasama yang solid sesama pengurus BKM Mukti Jaya dan karyawan. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dan memenuhi ketentuan yang

berlaku, kami sampaikan kepada masyarakat Kelurahan Muktiahrjo Kidul bahwa laporan keuangan BKM Mukti Jaya yang berdiri dari Neraca 31 Desember 2018, laporan ekuitas tanggal 31 Desember 2018 telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dan dinyatakan / telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan BKM Mukti Jaya tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan untuk laporan keuangan BKM Mukti Jaya Kelurahan Muktiharjo Kidul tahun buku 2019 pada saat laporan pertanggung jawaban ini disusun, masih dalam proses pelaksanaan penyelesaian audit KAP yang sama. Harapannya sebelum RWT dilaksanakan sudah ada hasil akhir dari KAP.

### **C. Peran BKM Mukti Jaya dalam Pembangunan Lingkungan Masyarakat**

Penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat lokal guna menciptakan penyediaan solusi yang tepat sasaran dan partisipatif, partisipatif disini diartikan sebagai peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan.

Peran serta masyarakat sangat penting untuk dilibatkandalam proses pembangunan untuk pengentasan kawasan kumuh, mulai dari proses perencanaan, pembentukan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Hal ini diarahkan agar masyarakat memiliki *sense of belonging* (rasa memiliki) dan akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan dan terlebih ketika mereka dapat merasakan manfaat dari infrastruktur penanganan kawasan kumuh yang dibangun bersama - sama (NUSP 2018). Dalam hal ini BKM mengambil peran diantaranya:

**a. Perencanaan Pembangunan Lingkungan Masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul**

Pada perencanaan pembangunan lingkungan masyarakat kelurahan Muktiharjo Kidul melalui program "*Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase*" atau disingkat NUSP 2018 merupakan program peningkatan kualitas pada kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang dilaksanakan berbasis atau digerakkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat penghuni kawasan permukiman kumuh di perkotaan. Program NUSP 2018 memiliki 3 (tiga) sasaran utama, yaitu :

- (i) Penguatan kapasitas kelembagaan untuk mengelola pembangunan perkotaan yang memihak pada masyarakat miskin;
- (ii) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh yang selaras dengan rencana pembangunan kota; dan
- (iii) Pembangunan permukiman baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai salah satu program pembangunan berbasis/digerakkan oleh masyarakat yang ditujukan untuk mendukung terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh, program NUSP 2018 akan dilaksanakan di 20 kabupaten/kota dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan rencana pembangunan kota yang berpihak pada masyarakat miskin dan peningkatan kondisi hunian pada kawasan permukiman kumuh melalui :

- (i) penyediaan sumber daya kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar pada lingkungan permukiman kumuh;
- (ii) memperkuat kapasitas daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan kota yang memihak masyarakat miskin;

- (iii) mengembangkan mekanisme keikutsertaan masyarakat didalam proses perencanaan pembangunan kota secara berkelanjutan; dan
- (iv) mempromosikan kerjasama pemerintah dengan swasta dalam rangka penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi keluarga/rumah tangga miskin. (Mukdul NUSP 2018)

Seperti keterangan dari koordinator BKM Mukti Jaya, bapak Abdul Rozaq bahwa perencanaan pembangunan lingkungan masyarakat Muktiharjo Kidul BKM Mukti Jaya melalui beberapa tahap awal yaitu identifikasi akar persoalan lingkungan dan melakukan pengkoordinasian dengan masyarakat.

“Pertama yaitu identifikasi akar persoalan lingkungan, setelah di identifikasi, di inventarisasi, kemudian disusunlah dalam rapat koordinasi itu dalam Rancangan kegiatan masyarakat. Jadi RKM itu dibentuk dalam Proses Partisipasi Masyarakat. Jadi kita mencatat, menghimpun jadi bukan dari BKM tok, ngajak masyarakat ngajak wong (jadi bukan hanya BKM saja, jadi mengajak masyarakat mengajak orang pula)” (Wawancara peneliti dengan narasumber pada tanggal 27 November 2020).

Di kelurahan Muktiharjo Kidul masih terdapat banyak infrastruktur yang kurang layak untuk masyarakat, seperti pemukiman kumuh, jalan yang kurang memadai, drainase serta kekurangan sumber air. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Abdul Rozaq:

“Penanganan infrastruktur masyarakat dan lingkungan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, social. Yang digarap lingkungan tapi nanti efeknya mengangkat ekonomi, karena yang awalnya jalan rusak, susah jadi bagus, enak, rumah yang awalnya murah karena fasilitas jalan tidak ada terus ada, jadi kan mensejahterakan”. (Wawancara peneliti dengan narasumber pada tanggal 27 November 2020).

Pelaksanaan kegiatan NUSP- 2018 ditingkat masyarakat membutuhkan adanya rencana kerja operasional yang mengacu pada

dokumen rencana aksi yang telah disusun (NUAP). Rencana kerja tersebut memuat langkah-langkah riil upaya pelibatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya melalui petunjuk teknis yang sudah disusun dengan melibatkan BKM, perangkat desa dan Masyarakat Dalam Penyusunan dokumen RKM yang disusun dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam terlibat aktif dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui NUSP- 2018. Seperti yang disampaikan oleh bapak Nugroho:

“Saya terlibat dalam perencanaan pembangunan jalan RW X. dulu jalan disekitar lingkungan ini masih tanah belum di paving, kemudian warga dikumpulkan di BKM diajak Rembug desa membahas pembangunan paving jalan dan selokan” (Wawancara peneliti dengan narasumber pada tanggal 29 November 2020).

Melalui Rencana Kerja Masyarakat ( RKM – NUSP ) Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur, serta perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di wilayah Muktiharjo Kidul khususnya pada kawasan dengan deliniasi kumuh sehingga membuat kawasan ini terbebas dari kumuh sesuai amanat SDG’s yaitu 100- 0- 100. Dokumen RKM/Rencana Kerja Masyarakat ini bermanfaat sebagai acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Program/Kegiatan NUSP di Kelurahan Muktiharjo Kidul Tahun anggaran 2018. Sejalan dengan yang disampaikan bapak Abdul Rozaq selaku Koordinator BKM Mukti Jaya sebagai berikut:

“Dana NUSP itu dari Asean Deveploment Bank, Itu istilahnya apa mungkin CSR atau bisa jadi program perkumpulan Bank Asian itu membantu Indonesia, Di Indonesia dipilih beberapa kabupaten provinsi, kebetulan Semarang salah satunya, Jawa Tengah, Jawa Tengah semarang salah satunya Muktiharjo Kidul karena alasannya Karena Dukungan Dokumen BKM Mukti Jaya berupa RKM (Rancangan Kegiatan Masyarakat) atau RPLP (rencana Pembangunan Lingkungan Pemukiman), kalau tidak ada dokumen sangat tidak mungkin, dukem dibuat secara ilmiah secara akademis pasti ada dasar itu jabarkan sendiri. Kita bisa membuat catatan atau dokumen berarti sudah

ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya itu Musyawarah masyarakat, fakta dilapangan, kondisi ekonomi dan macam- macam dan ini dianggap masih dibawah taraf hidup layak". (Wawancara peneliti dengan narasumber pada tanggal 27 November 2020).

Dalam Perencanaan pembangunan lingkungan masyarakat Muktiharjo Kidul memiliki perencanaan dalam infrastruktur pada kawasan kumuh dapat dilihat dari tools pengurangan kumuh sebagai berikut :

1. RT 3 RW 10

Pembangunan infrastruktur di lingkungan RT 3 RW 10 pada siklus ini melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas jalan, perbaikan drainase

2. RT 9 RW 13

Pembangunan infrastruktur di lingkungan RT 9 RW 13 pada siklus ini melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas jalan dan swadaya masyarakat yaitu dengan berkreasi menghias dinding jalan dengan lukisan tiga dimensi (3D).

3. RT 2 RW 23

Pembangunan infrastruktur di lingkungan RT 2 RW 23 pada siklus ini melaksanakan kegiatan peningkatan jalan, perbaikan drainase, dan swadaya masyarakat yaitu dengan menghias dinding dengan pot- pot tanaman sehingga lingkungan menjadi asri.

Berdasarkan Dokumen RKM untuk siklus pertama pada tahun 2018, prioritas pekerjaan di kawasan kumuh Kelurahan Muntiharjo Kidul adalah untuk jenis kegiatan drainase, pembangunan jalan, persampahan, dan Penerangan Jalan Umum.

Konstruksi drainase yang akan dibangun adalah berupa saluran dengan menggunakan batu belah dengan pembuatan tutup saluran dengan konstruksi cor beton. Untuk jalan, akan dilakukan dengan

menggunakan paving, karena air lingkungan dapat lebih mudah menyerap ke tanah dan lebih mudah dalam pengerjaan dan perawatan. Sedangkan untuk rencana penanganan persampahan adalah dengan pengadaan Motor Sampah.

Dokumen RKM siklus 1 memiliki total anggaran sebesar Rp.534.300.000, (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dimana dana tersebut terdiri dari batuan Pembangunan Masyarakat sebesar Rp.500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) serta dana swadaya yang berasal dari masyarakat baik dalam bentuk *inkind* maupun *incash* sebesar Rp.34.300.000, (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

#### **b. Pelaksanaan pembangunan lingkungan Masyarakat**

Proses pelaksanaan pembangunan lingkungan masyarakat Muktiharjo Kidul sesuai dengan RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat) yang telah disepakati oleh BKM Mukti Jaya, masyarakat, pihak desa serta pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang ada tersebut diharapkan bisa mengurangi tingkat kekumuhan dari kumuh sedang menjadi tidak kumuh. Dana yang Sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan ADB (Asian Development Bank), Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan koordinator BKM Mukti Jaya, bapak Abdul Rozaq sebagai berikut:

“Dana NUSP itu dari Asean Deveploment Bank, Itu istilahnya apa mungkin CSR atau bisa jadi program perkumpulan Bank Asian itu membantu Indonesia, Di Indonesia dipilih beberapa kabupaten provinsi, kebetulan Semarang salah satunya, Jawa Tengah, Jawa Tengah Semarang salah satunya Muktiharjo Kidul karena alasannya Karena Dukungan Dokumen BKM Mukti Jaya berupa RKM (Rancangan Kegiatan Masyarakat) atau RPLP (Rencana Pembangunan Lingkungan Pemukiman), kalau tidak ada dokumen sangat tidak mungkin, dukem dibuat secara ilmiah secara akademis pasti ada dasar itu jabarkan sendiri. Kita bisa membuat catatan atau dokumen berarti sudah ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya itu Musyawarah masyarakat,

fakta dilapangan, kondisi ekonomi dan macam- macam dan ini dianggap masih dibawah taraf hidup layak” komponen kegiatan perbaikan infrastruktur kawasan/lingkungan permukiman kumuh. (Wawancara peneliti dengan bapak Abdul Rozaq pada tanggal 27 November 2020).

Menurut NUSP 2018 aspek- aspek yang dinilai dalam kekumuhan adalah :

1. Aspek kondisi Bangunan Gedung
2. Aspek Kondisi Jalan Lingkungan
3. Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum
4. Aspek Kondisi Drainase Lingkungan
5. Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah
6. Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan
7. Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran

Manfaat pembangunan infrastruktur di lokasi Kelurahan Muktiharjo Kidul terutama pembangunan mengenai jalan dan drainase sangat membantu perubahan wilayah yang semula kumuh karena genangan dapat berkurang genangannya. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada Tahun 2018 tidak hanya menitik beratkan pada aspek jalan dan drainase, namun melihat pada aspek persapahan, air bersih, dan proteksi kebakaran. Pelaksanaan pembangunan untuk mengurangi luasan lahan kumuh, menggunakan minimal 4 indikator sehingga pengurangan kumuh di Kelurahan Muktiharjo Kidul akan lebih maksimal.

Pelaksanaan pembangunan lingkungan masyarakat Muktiharjo Kidul ini dapat terlihat melalui pembangunan Sistem jaringan jalan pada kawasan perumahan dan permukiman terdiri dari : (a) jalan lokal sekunder I (LS- I) yang merupakan jalan poros perumahan/permukiman yang menghubungkan antara jalan kolektor dan atau pusat aktivitas di perumahan/permukiman; (b) jalan lokal sekunder II (LS- II) yang menghubungkan akses menuju jalan lokal sekunder III dan menghubungkan aktivitas atau menuju jalan yang

lebih tinggi hirarkinya; dan (c) jalan lokal sekunder III (LS- III) yang memiliki fungsi utama untuk menghubungkan lalu- lintas dari dan menuju persil jalan lainnya dalam perumahan. Disamping sistem jaringan jalan lingkungan tersebut, pada kawasan permukiman juga terdapat jaringan jalan setapak yang berfungsi untuk memberikan pelayanan sebagai jalan pintas. Yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 3. 6 Kondisi Jalan**

No.	Hirarki Jalan	Lebar Perkerasan (m)	Panjang Jalan (m)	Konstruksi	Kondisi Jalan
1.	Jln Lingkungan (LS-I)	4 – 6	13.000	beton dan Paving	Baik dan Rusak Sedang
2.	Jln Lingkungan (LS-II)	3 – 4	6.000	Paving	Baik dan Rusak Sedang
3.	Jln Lingkungan (LS-III)	2- 3	9.000	Paving	Baik dan Rusak Sedang
4.	Jalan Setapak	0,8 – 2	12.000	Paving dan tanah	Baik dan Rusak Sedang
	Jumlah		40.000		

Sumber : Data Profil Kelurahan Tahun 2018 dan survey lapangan

Catatan:

Rusak ringan = 10 – 30 %

(kerusakan fisik dan fungsinya)

Rusak ringan = 30 – 60 %

(kerusakan fisik dan fungsinya)

Rusak ringan = 60 – 90 %

(kerusakan fisik dan fungsinya)


### 1. Kondisi Sarana- Prasarana Dasar Lingkungan






Perkembangan kawasan permukiman di kelurahan Muktiharjo Kidul yang termasuk kawasan retan di wilayah Kecamatan Pedurungan dapat dipandang sebagai kawasan yang direncanakan dan tertata dengan baik, maupun kawasan


permukiman Muktiharjo Kidul yang merupakan cikal bakal tumbuhnya kawasan perkotaan dan terus berkembang mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatannya.

Berkenaan dengan kedua jenis tersebut, dalam suatu wilayah atau kota, perkembangan dari kawasan permukiman sangat rentan terhadap adanya perkembangan yang tidak terkendali dan menyebabkan munculnya permukiman kumuh yang seringkali berdampak lebih lanjut pada meningkatnya kesenjangan masyarakat, angka kriminalitas dan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Kelurahan Muktiharjo Kidul memiliki sarana dan prasarana yang di manfaatkan masyarakat, sedangkan kondisi sarana dan prasana masyarakat kelurahan Muktiharjo Kidul memiliki beberapa permasalahan hal ini terlihat melalui table berikut:

Tabel 3.7 Sarana Prasarana dan Permasalahan Lingkungan di Kelurahan Muktiharjo Kidul

NO	PRASARANA / SARANA	PERMASALAHAN	DOKUMENTASI
1	Bangunan Permukiman	Rumah tidak layak huni yang masih ada di semua RT/RW wilayah delinisi menimbulkan kesan kumuh, dinding yang tidak permanen, dan masih adanya lantai dari tanah merupakan salah satu media bakteri penyebab penyakit	

2	Air Bersih	Lokasi sumur yang berdekatan dengan selokan meyebabkan rembesan yang mengakibatkan pencemaran air sehingga air sumur tidak layak konsumsi karena berbau	
3	Infrastruktur Jalan	Jalan yang masih dari tanah dan tidak adanya saluran/drainase menyebabkan becek pada musim hujan serta terjadinya genangan dari air limbah rumah tangga	
4	Saluran	Saluran limbah rumah tangga yang langsung menyentuh dinding rumah menyebabkan rusaknya fondasi rumah akibat tergerus air limbah selokan	
5	Infrastruktur Drainase	Saluran yang rusak dan belum dibenahi mengakibatkan menggerus tanah di samping saluran mengakibatkan saluran dangkal dan menjadi genangan	
6	Persampahan	Tong sampah yang tidak beraturan bahkan ada yang dari keranjang bamboo menyebabkan pemandangan yang kurang enak	

7	Kebakaran	PJU (Penerangan Jalan Umum) yang kurang memenuhi syarat mengakibatkan rawan kebakaran jika tiba-tiba roboh menimpa rumah warga atau pejalan kaki yang lewat	
---	-----------	---	--

Sumber data : dokumen BKM Mukti Jaya NUSP 2018

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan hak bagi masyarakat dan lingkungan. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kendala dan permasalahan, terutama disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Perencanaan yang relatif masih parsial dan sektoral, kurang terintegrasi antar semua subsektor.
2. Koordinasi dan kinerja antar pihak-pihak yang berkepentingan masih kurang terpadu;
3. Keterbatasan anggaran dan investasi, dimana semua sektor masih belum menjadi skala prioritas;
4. Investasi sektor swasta masih terbatas, karena masih dinilai kurang layak;
5. Partisipasi swasta (CSR) masih relatif terbatas, karena kurangnya sosialisasi dan edukasi.
6. Infrastruktur yang akan dibangun harus berdasarkan pada Analisis Kebutuhan Infrastruktur dengan mendasarkan pada SPM (Standar Pelayanan Minimum) sesuai dengan Peraturan Pekerjaan Umum Nomor 01\_PRT\_M\_2014

Hal ini mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk ikut serta dalam program yang diprakarsai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Rencana yang akan di tindak lanjuti dalam

pelaksanaan pekerjaan ini meliputi pekerjaan peninggian jalan paving dimana kawasan tersebut katagori rawan rob, pekerjaan renovasi drainase existing yang ada sekarang ini belum sepenuhnya jaringan infrastruktur itu ada baik dari saluran rumah tangga menuju pembuangan rencana investasi dalam program jangka menengah adalah Perbaikan saluran drainase arteri yos sudarso yang masih bnyak kendala sehingga air rob tidak dapat teralirkan yang rencananya akan dilakukan oleh dinas PSDA, pembuatan saluran sekunder dan rumah pompa, sedangkan rencana saluran drainase sekunder yang rencananya akan disalurkan ke sungai primer (kali beringi) melalui system pompa air yang rencananya laksanakan oleh dana APBD maupun program pendukunglainya.

Beberapa ketentuan yang dimuat dalam dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) adalah sebagai berikut:

- a. Jenis infrastruktur yang akan direncanakan dan dibangun adalah infrastruktur yang menjadi prioritas dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan hasil analisis kebutuhan/verifikasi NUAP oleh LCO dan PMU NUSP- 2018.
- b. RKM disusun untuk setiap paket kontrak kegiatan masyarakat dengan nilai kontrak paket adalah sebesar dengan Rp. 500.000.000,00 Paket kontrak tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur termasuk biaya administrasi pelaksanaan kegiatan sebesar 1,5% dari nilai kontrak.
- c. Kegiatan pembangunan infrastruktur dibiayai oleh dana pinjaman ADB yang disalurkan kepada masyarakat sebagai dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM).
- d. Analisa harga satuan pekerjaan menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2013.

e. Tipologi konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8 Tipologi Konstruksi**

No.	Komponen Infrastruktur	Konstruksi	Dimensi
1	Drainase Lingkungan (terbuka/tertutup)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasangan batu bata</li> <li>b. Pasangan batu kali 1:4</li> <li>c. Pasangan beton min. K- 175</li> </ul>	$0,3 \text{ m} \leq \text{lebar} \leq 1 \text{ m}$
2	Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. IPAL komunal (fiber/beton)</li> <li>b. Jaringan perpipaan komunal</li> <li>c. MCK umum (jumlah bilik disesuaikan dengan kesediaan lahan)</li> </ul>	<p>Cakupan pelayanan minimal 20 – 40 KK</p>
3	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bak sampah, konstruksi batu bata</li> <li>b. TPS, konstruksi batu bata</li> <li>c. Motor/gerobak/becak sampah</li> </ul>	<p>Kapasitas <math>0,6 \text{ m}^3</math></p> <p>Kapasitas <math>\geq 20 \text{ KK}</math></p> <p>Kapasitas <math>\leq 2 \text{ m}^3</math></p>
4	RTP Ruang Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lampu TL/LED, daya <math>\geq 40</math> watt, tiang</li> <li>b. lampu baja galvanis + pondasi batu</li> <li>c. kali 1:4</li> </ul>	<p>Diameter tiang <math>\geq 2\frac{1}{4}</math> Inch</p> <p>Tinggi tiang sesuai</p>



Sumber data : Dokumen NUSP 2018

Kemudian setelah pelaksanaan pembangunan jalan seperti yang terjadi di RW X, terlihat perbaikan di beberapa sarana kelurahan Muktiharjo Kidul, sebagai berikut:



Gambar 3.3. Kondisi jalan dan DRAINASE sebelum dan sesudah Program NUSP 2018 dijalankan.

Pemanfaatan kreatifitas warga lingkungan dengan dilakukanya pelukisan dari pasir dan semen di RW XIII



Gambar 3.3 Kondisi lingkungan sebelum dan sesudah Program NUSP 2018 dijalankan.

Peninggian dan peningkatan jalan paving dan perbaikan

saluran yang dibangun program NUSP- 2 tahun 2018 mendapat apresiasi dari masyarakat, warga RT 02 / RW 23 sangat senang, karena jalan kering (tidak tergenang banjir) dan tidak bergelombang lagi. Hal ini mendorong masyarakat untuk mempercantik daerahnya dengan swadaya penghijauan dengan menggunakan pot- pot tanaman yang dipasang di atas saluran yang tertutup. Sehingga lingkungannya menjadi asri, semakin hijau dan tidak gersang.



Gambar 3.4. Kondisi Peninggian dan peningkatan jalan paving dan perbaikan saluran

## 2. Anggaran Pembangunan Lingkungan Kelurahan Muktiharjo Kidul

Dalam pengerjaan pembangunan lingkungan kelurahan muktiharjo kidul ada Beberapa ketentuan yang dimuat dalam dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Kontrak untuk 1 (satu) paket adalah sebesar US\$ 40.000 atau ekuivalen Rp. 500.000.000.
- b. Paket kontrak tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur termasuk Biaya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan sebesar 1,5% dari Nilai Kontrak.
- c. Kegiatan pembangunan infrastruktur dibiayai oleh dana pinjaman ADB yang disalurkan kepada masyarakat sebagai dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM).
- d. Analisa harga satuan pekerjaan menggunakan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum, Nomor 11 Tahun 2013.

**Tabel 3.9 Anggaran Pembangunan**

<b>Kelurahan</b>	:	Muktiharjo Kidul	
<b>Nama BKM</b>	:	Mukti Jaya	
<b>Lokasi Pekerjaan</b>	:	RT.02 RW. X, RT.2 RW. XIII, RT.04 RW. XIV dan RT.2 RW XXIII	
<b>Nama Paket Pekerjaan</b>	:	Jalan dan Drainase	
		1. Jalan : Paving K 300	
<b>Tipe &amp; Konstruksi</b>	:	2. Drainase Buis U- 30 & Buis U- 40	
		3.	
<b>Volume Pekerjaan</b>	:	1. Jalan : 467 m	
	:	2. Drainase : Buis U- 30 = 200 m <sup>3</sup> ,	Buis U- 40 = 283 m <sup>3</sup>
		3.	
<b>Jangka Waktu Pelaksanaan</b>	:	3 bulan ( 90 hari kalender )	
		Total	Rp. 534.300.000,-
<b>Rencana Anggaran Biaya</b>	:	Swadaya Masyarakat	Rp. 34.300.000-
		BLM	Rp. 500.000.000,-
<b>Luas Penanganan Kumuh</b>	:	3,02 Ha	
		Jumlah : 225 KK	
<b>Penerima Manfaat</b>	:	Miskin : 136 KK	
		Miskin : 60,44%	
<b>Status Tanah/Lahan Lokasi Kegiatan</b>	:	Fasilitas Umum	

Sumber Data : NUSP 2018 BKM Mukti Jaya

### c. Evaluasi lingkungan Masyarakat

BKM memiliki program di bidang sosial, di bidang ekonomi dan bidang lingkungan, dibidang lingkungan meliputi perbaikan jalan dengan pemasangan batako, perbaikan gorong- gorong, normalisasi saluran pengairan, pemasangan paving, penghijauan serta,

mempercantik lingkungan dengan lukisan Mural 3 dimensi di dinding rumah warga yang tidak hanya menggunakan cat, tetapi juga menambahkan bentuk menggunakan semen dan pasir sehingga lukisan menjadi lebih hidup.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan koordinator BKM Mukti Jaya kelurahan Muktiharjo Kidul, bapak Abdul Rozaq menyatakan sebagai berikut:

“ Kegiatan yang telah dilakukan dalam pembangunan masyarakat yaitu perbaikan gorong-gorong, normalisasi saluran pengairan, pemasangan paving, penghijauan serta, mempercantik lingkungan dengan lukisan Mural 3 dimensi di dinding rumah warga yang tidak hanya menggunakan cat, tetapi juga menambahkan bentuk menggunakan semen dan pasir. Dana pembuatan infrastruktur itu bersumber dari masyarakat yang bersifat sukarela baik tenaga, uang maupun makanan”. (Wawancara peneliti dengan narasumber pada tanggal 27 November 2020).

BKM mengadakan pertemuan bersama dengan perangkat desa, serta masyarakat guna evaluasi pembangunan lingkungan masyarakat, rapat tersebut bersifat tidak menentu dan tergantung situasi dan kondisi. Jika memungkinkan dalam situasi permasalahan yang harus segera dibahas maka diadakan rapat. Seperti hasil wawancara kepada bapak H. Minanto selaku dewan pengawas BKM Mukti Jaya:

“Pelaksanaan rapat tidak bisa dipastikan berapa pastinya. tidak menentu, ada kalanya kita rapat membahas program seminggu sekali, bisa juga sebulan sekali. Jadi rapat itu sesuai agenda kegiatan. Yang dibicarakan dan dibahas pun sesuai dengan agendanya, misal kita ada program pemasangan batako dalam lingkungan masyarakat, itu kita adakan rapat pembahasan bersama masyarakat, agar terjadi musyawarah dan mufakat. Tidak hanya sekedar membangun tapi masyarakat tidak dilibatkan”.

Sependapat dengan bapak H. Minanto, bapak Nugroho juga berpendapat serupa melalui wawancara yang dilakukan peneliti yaitu: “Rapatnya BKM tidak menentu mas, kalau ada kegiatan yang melibatkan masyarakat baru masyarakat diundang,

seperti pemasangan paving jalan ini saya diundang. Namun ketika pembangunan drainase saya tidak diundang karena tidak melibatkan saya". (Wawancara peneliti dengan narasumber pada tanggal 29 November 2020).

Pertemuan atau rapat evaluasi tersebut dilaksanakan di balai desa, atau dikantor BKM Mukti Jaya. Pelaksanaan pembangunan lingkungan Masyarakat ini pasti mendapatkan kendala baik dari BKM, pemerintah desa maupun masyarakat. Baik masalah dana maupun pasifnya masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Rozaq:

"Kendalanya ya terkait pencairan dana dari pusat, karena dana pembangunan kita dari pusat. Sedang kendala dalam proses ada di kesadaran masyarakat mas, BKM sudah mengupayakan pembangunan pasti masih ada masyarakat yang pasif dan tidak mau berkontribusi bahkan sampai protes. Padahal ini demi kebaikan masyarakat itu sendiri. Kalau dari pihak kelurahan saya rasa tidak ada kendala baik perijinan maupun pengkoordinasian". (Wawancara peneliti dengan narasumber pada tanggal 27 November 2020).

Peran BKM Mukti Jaya disini bertindak bukan hanya sebagai wadah aspirasi masyarakat saja, namun jika dikaitkan dengan dakwah, BKM juga melaksanakan dakwah bil hal yaitu dengan mengajak masyarakat untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan baik dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang lebih baik. Diwujudkan dengan adanya program NUSP 2018 yang dilaksanakan di Kelurahan Muktiarjo Kidul. Dari awal pengumpulan aspirasi- aspirasi masyarakat, lalu disusunlah dokumen, sampai pelaksanaanya.

**BAB IV**  
**ANALISIS PERAN BKM MUKTI JAYA DALAM PEMBANGUNAN**  
**LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL**

**A. Analisis Peran BKM Mukti Jaya Dalam Pembangunan Lingkungan Masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul**

BKM salah satu lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan, dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif. Menurut Kusumo, BKM pada prinsipnya adalah wadah sinergis masyarakat bagi orang-orang yang peduli terhadap permasalahan kemiskinan di komunitasnya. Dalam melaksanakan misi pemberdayaan masyarakat, BKM menumbuhkembangkan kelompok-kelompok swadaya masyarakat sebagai media belajar masyarakat untuk memecahkan masalah kemiskinan secara mandiri. Fungsi BKM adalah sebagai wadah sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Badan ini memfasilitasi kebutuhan dari kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang ada atau masyarakat miskin pada umumnya untuk dapat terus tumbuh, berkembang jaringan usahanya dan meningkatkan perekonomiannya. BKM juga merupakan jembatan penghubung aspirasi warga desa/kelurahan serta memperjuangkan warga di tingkat kelurahan/desa dalam musbangdes. BKM juga sebagai peran utama dalam menjalankan sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk masyarakat warga penerima manfaat.

Peran BKM Mukti Jaya disini bertindak bukan hanya sebagai wadah aspirasi masyarakat saja, namun jika dikaitkan dengan dakwah, BKM juga melaksanakan dakwah bil hal yaitu dengan mengajak masyarakat untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan baik dalam pembangunan infrastruktur,

ekonomi, dan sosial yang lebih baik. Diwujudkan dengan adanya program NUSP 2018 yang dilaksanakan di Kelurahan Muktiarjo Kidul. Dari awal pengumpulan aspirasi- aspirasi masyarakat, lalu disusunlah dan dijadikan dokumen, sampai pelaksanaan program NUSP 2018.

Adapun pembagaaian peran dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui ekonomi bergulir dibagi menjadi 3 bagaaian yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif.

### **1. Peran Aktif.**

Peran aktif adalah peran yang diberikan kepada anggota atau kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus BKM, pemerintah Desa, Masyarakat dan lain sebagainya. Peran aktif dari Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) Mukti Jaya dalam pembangunan lingkungan masyarakat kelurahan mukti Harjo dapat dilihat melalui tahap perencanaan, pembangunan dan evaluasi, dimana BKM Mukti Jaya membangun Sarana dan prasana desa berdasarkan skala prioritas yang harus diutamakan diantaranya dengan memasang paving dijalan desa guna memudahkan akses jalan warga, seperti yang disampaikan oleh bapak Abdul Rozaq selaku koordinator BKM Mukti Jaya. "Penanganan insfrastruktur masyarakat dan lingkungan tujuanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, social. Yang digarap lingkungan tapi nanti efeknya mengangkat ekonomi, karena yang awalnya jalan rusak, susah jadi bagus, enak, rumah yang awalnya murah karena fasilitas jalan tidak ada terus ada, jadi kan mensejahterakan".

Hal ini juga sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah peneliti

lakukan di desa Muktiharjo Kidul, setiap tahun BKM menetapkan rencana tahunan yang berisi kegiatan-kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan lingkungan. Perencanaan program BKM serta pelaksanaan kegiatannya dibagi berdasarkan bidangnya masing-masing. Mengingat tidak adanya agenda perkumpulan rutin yang terencana secara pasti, karena disamping sebagai pengurus BKM mereka juga memiliki kesibukan yang lain.

Kegiatan yang dilakukan BKM dan pemerintah desa dalam pembangunan lingkungan masyarakat sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam program NUSP 2018 yang disepakati dengan masyarakat dalam hasil RKM (Rencana Kerja Masyarakat) seperti pemavingan jalan, pembetonan jalan, perbaikan drainase, penghijauan serta mempercantik lingkungan dengan kreasi lukisan mural 3 dimensi.

## 2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Peran partisipatif ini memiliki dampak positif dengan mengikutsertakan masyarakat, karena masyarakat lebih mudah mengetahui pelaksanaan program BKM. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan peran partisipatif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program. BKM Mukti Jaya melalui Program NUSP 2018 dapat memberi manfaat terhadap masyarakat dengan ikut melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Nugroho

“Saya terlibat dalam perencanaan pembangunan jalan Rw X. dulunya jalan disekitar lingkungan ini masih tanah belum di paving, kemudian warga dikumpulkan di BKM diajak Rembug desa membahas pembangunan paving jalan dan selokan. Kemudian pada saat pembangunan saya pun ikut serta dan bekerja mem paving jalan ini” (Wawancara peneliti dengan narasumber

pada tanggal 29 November 2020)

Pendapat tersebut pun diperkuat oleh warga yang lain, Seperti yang dituturkan oleh ibu Khasanah selaku warga RT 02 RW 23 “Dulu pada saat pembangunan got (drainase) ini saya tidak membantu apa apa mas, hanya bisa membantu jajan, kayak gorengan, es teh atau air minum itu pun seadanya, gak menentu”. (Wawancara peneliti dengan narasumber pada tanggal 29 November 2020)

Ikut melibatkan masyarakat menimbulkan manfaat menimbulkan rasa empati dan sadar akan kepentingan bersama Dengan adanya pengorganisasian tersebut BKM Mukti jaya membuat program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Menimbulkan rasa simpati terhadap sesama baik oleh BKM, pemerintah desa maupun masyarakat karena adanya rasa kepentingan bersama.

### 3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi- fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. Peran pasif BKM Mukti jaya dapat terlihat melalui upaya sosialisasi, rapat, pengkoordinasian melibatkan masyarakat, Cara untuk pengorganisasian masyarakat dapat dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat yang setiap RT- nya diwakili oleh ketua RT, sekertaris, bendahara dan masyarakat setempat, serta penerapan kebijakan untuk menyadarkan masyarakat dengan adanya MoU dan dibentuknya tim pengawas yang terdiri dari TIP (Tim Identifikasi Persoalan) dan Tim bidang pengawasan yang dianggotai oleh H Minanto, Najib SE,MM dan Susy Nurbety, SE. sebagai dewan pengawas.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh koordinator BKM Mukti Jaya Abdul Rozaq “Merencanakan, memproses, melaksanakan dan sebagainya adalah hal mudah tapi sesudah dibentuk, dibuatkan menjaga dan merawat iu menjadi hal yang sulit. Jadi lemahnya di masyarakat kita itu dan lembaga yang

menangani disitu di kesadaran masyarakat yang lemah. Tapi ini jangan dijadikan suatu objek. Distrosinya adalah ini ada program kita harus menindaklanjuti agar progam tersebut bisa eksis. Jaga dibiarkan dan masyarakat tidak diajak untuk ayo peduli lingkungan hanya pejabat yang mengajak maka akan dirusak lagi. hal inilah yang mendasari agar diadakanya kesepakatan bersama atau MoU. Jadi Ada tim pengawasan, makanya program NUSP 2018 itu sudah bagus dulu ada yang namanya ketua TIP kemudian ada ketua bidang pengawasan, jadi pasca (NUSP) itu jika ada laporan, lalu ditindak lanjut oleh penerima manfaat.” (Wawancara peneliti dengan narasumber pada tanggal 27 November 2020).

Dengan melibatkan masyarakat didalam BKM Mukti Jaya tidak diartikan sebagai organisasi, tetapi lebih merupakan kesepakatan bersama sebagai warga disuatu kelurahan untuk bersama- sama membangun masyarakat dan lingkungan untuk arah yang lebih baik.

## **B. ANALISIS HASIL PERAN BKM MUKTI JAYA DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL**

### **1. Pembangunan sarana prasana Masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul**

Proses pelaksanaan pembangunan lingkungan masyarakat Muktiharjo Kidul sesuai dengan RKM (Rencana Kegiatan Masyarakat) yang telah disepakati oleh BKM, masyarakat, pihak desa serta pemerintah. pembangunan infrastruktur yang ada tersebut diharapkan bisa mengurangi tingkat kekumuhan dari kumuh sedang menjadi tidak kumuh. Dana yang sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan ADB (Asian Development Bank).

Pembangunan infrastruktur di lokasi Kelurahan Muktiharjo Kidul terutama pembangunan mengenai jalan dan drainase sangat membantu perubahan wilayah yang semula kumuh karena genangan dapat berkurang genangannya. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada Tahun 2018 tidak hanya menitik beratkan pada aspek jalan dan drainase, namun melihat pada aspek

persapahan, air bersih, dan proteksi kebakaran.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan Pembangunan lingkungan di kelurahan Muktiharjo Kidul ini sangat terlihat melalui pembangunan Sistem jaringan jalan pada kawasan perumahan dan permukiman yang memiliki fungsi utama untuk menghubungkan lalu- lintas dari dan menuju persimpangan jalan lainnya dalam perumahan. Di samping sistem jaringan jalan lingkungan tersebut, pada kawasan permukiman juga terdapat jaringan jalan setapak yang berfungsi untuk memberikan pelayanan sebagai jalan pintas.

Kemudian pembangunan perbaikan saluran drainase di lingkungan RW 10 dan RW 13. Guna meminimalisir banjir yang sering terjadi, akibat kurang memudahinya system drainase di lingkungan tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam gambar berikut ini:

Perbaikan drainase dan jalan di RT 01 RW 10 Pemavingan jalan dan drainase di RT 02 RW 13





Kondisi lingkungan sebelum dan sesudah Program NUSP 2018 dijalankan.

Peninggian dan peningkatan jalan paving dan perbaikan saluran yang dibangun program NUSP tahun 2018 mendapat apresiasi dari masyarakat, warga RT 02 / RW 23 sangat senang, karena jalan kering (tidak tergenang banjir) dan tidak bergelombang lagi.

## **2. Pembangunan Lingkungan Masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul menimbulkan kreatifitas warga**

Pembangunan lingkungan masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul tidak hanya berpatok kepada program pemerintah tetapi juga memanfaatkan kreatifitas warga guna mempercantik lingkungan dengan dilakukanya pelukisan kreasi dinding 3 dimensi dari pasir dan semen di RW XIII



Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti Seperti yang terlihat dalam gambar diatas Peninggian dan peningkatan jalan paving dan perbaikan saluran yang dibangun program NUSP tahun 2018 mendapat apresiasi dari masyarakat, warga RT 02 / RW 23 sangat senang, karena jalan kering (tidak tergenang banjir) dan tidak bergelombang lagi. penanaman kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan mendorong masyarakat untuk mempercantik daerahnya dengan swadaya penghijauan dengan menggunakan pot-pot tanaman yang dipasang di atas saluran yang tertutup. Sehingga lingkungannya menjadi asri, semakin hijau dan tidak gersang.

### 3. Menumbuhkan kepedulian masyarakat dengan rasa saling mengerti

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan. peneliti menemukan peran partisipatif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program. BKM Mukti Jaya melalui Program NUSP dapat memberi manfaat terhadap masyarakat dengan ikut melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Nugroho.

“Saya terlibat dalam perencanaan pembangunan jalan RW X. Dulu jalan disekitar lingkungan ini masih tanah belum di paving, kemudian warga dikumpulkan di BKM diajak *rembug* desa

membahas pembangunan paving jalan dan selokan. Kemudian pada saat pembangunan saya pun ikut serta dan bekerja mem paving jalan ini". (Wawancara peneliti dengan narasumber pada tanggal 29 November 2020)

Pendapat tersebut pun diperkuat oleh warga yang lain, Seperti yang dituturkan oleh ibu Khasanah selaku warga RT 02 RW X " dulu pada saat pembangunan got (drainase) ini saya tidak membantu apa apa mas, hanya bisa membantu jajan, kayak gorengan, es teh atau air minum itu pun seadanya, gak menentu ".(Wawancara peneliti dengan narasumber pada tanggal 29 November 2020)

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Koordinator "Merencanakan, memproses, melaksanakan dan sebagainya adalah hal mudah, tapi sesudah dibentuk, dibuatkan menjaga dan merawat iu menjadi hal yang sulit. Jadi lemahnya di masyarakat kita itu dan lembaga yang menangani disitu di kesadaran masyarakat yang lemah. Tapi ini jangan dijadikan suatu objek. Distrosinya adalah ini ada program kita harus menindaklanjuti agar progam tersebut bisa eksis. Jaga dibiarkan dan masyarakat tidak diajak untuk ayo peduli lingkungan hanya pejabat yang mengajak maka akan dirusak lagi. hal inilah yang mendasari agar diadakanya kesepakatan bersama atau MoU (*Memorandum of Understanding*). Jadi Ada tim pengawasan, makanya program NUSP 2018 itu sudah bagus dulu ada yang namanya ketua TIP kemudian ada ketua bidang pengawasan, jadi pasca (NUSP) itu jika ada laporan, lalu ditindak lanjut oleh penerima manfaat." (Wawancara peneliti dengan narasumber pada tanggal 27 November 2020)

. Ikut melibatkan masyarakat menimbulkan manfaat dengan membuat program yang benar- benar dibutuhkan masyarakat akan menumbuhkan rasa empati dan sadar tentang kepentingan bersama melalui pengorganisasian BKM Mukti Jaya. baik oleh BKM, pemerintah desa maupun masyarakat karena adanya rasa kepentingan bersama yang terbentuk.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran BKM Muki Jaya dalam pembangunan lingkungan masyarakat kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Peran BKM Muki Jaya dalam pembangunan lingkungan masyarakat kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dapat dilihat melalui program NUSP 2018.
2. Peran BKM Mukti Jaya disini bertindak bukan hanya sebagai wadah aspirasi masyarakat saja, namun jika dikaitkan dengan dakwah, BKM juga melaksanakan dakwah bil hal yaitu dengan mengajak masyarakat untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan baik dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang lebih baik. Diwujudkan dengan adanya program NUSP 2018 yang dilaksanakan di Kelurahan Muktiharjo Kidul. Dari awal pengumpulan aspirasi- aspirasi masyarakat, lalu disusunlah dokumen, sampai pelaksanaannya.
3. Adapun pembagian peran dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mukti jaya terhadap program ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu :
  - a. Peran aktif dari Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) Mukti Jaya dalam pembangunan lingkungan masyarakat kelurahan Muktiharjo dapat dilihat melalui tahap perencanaan, pembangunan dan evaluasi, dimana BKM Mukti Jaya membangun Sarana dan prasana desa berdasarkan skala prioritas yang harus

diutamakan diantaranya dengan memasang paving di jalan desa guna memudahkan akses jalan warga peran

b. Peran partisipatif ini memiliki dampak positif dengan mengikut sertakan masyarakat, karena masyarakat lebih mudah mengetahui pelaksanaan program BKM. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan peran partisipatif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program. BKM Mukti Jaya melalui Program NUSP 2018 dapat memberi manfaat terhadap masyarakat dengan ikut melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Ikut melibatkan masyarakat menimbulkan manfaat menimbulkan rasa empati dan sadar akan kepentingan bersama Dengan adanya pengorganisasian tersebut BKM Mukti jaya membuat program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Menimbulkan rasa simpati terhadap sesama baik oleh BKM, pemerintah desa maupun masyarakat karena adanya rasa kepentingan bersama

c. Peran pasif BKM Mukti jaya dapat terlihat melalui upaya sosialisasi, rapat, pengkoorganisasian melibatkan masyarakat, cara untuk pengorganisasian masyarakat dapat dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat yang setiap RT- nya diwakili oleh ketua RT, sekertaris, bendahara dan masyarakat setempat, serta penerapan kebijakan untuk menyadarkan masyarakat dengan adanya MoU dan dibentuknya tim pengawas yang terdiri dari TIP (Tim Identifikasi Persoalan) dan Tim bidang pengawasan yang dianggotai oleh H Minanto, Najib SE,MM dan Susy Nurbety, SE. sebagai dewan pengawas.

4. Peran BKM Muki Jaya dalam pembangunan lingkungan masyarakat kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dapat dilihat melalui program NUSP 2018.

Pembangunan infrastruktur di lokasi Kelurahan Muktiharjo Kidul terutama pembangunan mengenai jalan dan drainase sangat membantu perubahan wilayah yang semula kumuh karena genangan dapat berkurang genangannya. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada Tahun 2018 tidak hanya menitik beratkan pada aspek jalan dan drainase, namun melihat pada aspek persapahan, air bersih, dan proteksi kebakaran. Pembangunan tersebut dapat dilihat ,melalui perbaikan saluran drainase di lingkungan RW 10 dan RW 13. Guna meminimalisir banjir yang sering terjadi di lingkungan tersebut. Kemudian pembangunan Peninggian dan peningkatan jalan paving dan perbaikan saluran di RW 23 penanaman kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan mendorong masyarakat untuk mempercantik daerahnya dengan swadaya penghijauan dengan menggunakan pot- pot tanaman

## **B. SARAN**

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Peran BKM Muki Jaya dalam pembangunan lingkungan masyarakat kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BKM diharapkan dalam melaksanakan program tidak hanya dengan pendekatan pembangunan infrastruktur maupun sarana prasarana tetapi juga dengan pendekatan ekonomis dan karakter. Dengan memberikan pelatihan baik skill maupun kewirausahaan kepada masyarakat, agar menumbuhkan kemandirian dalam masyarakat
2. Bagi Pemerintah diharapkan untuk lebih memberikan fasilitas baik secara finansial maupun moral serta pelatihan agar

masyarakat bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Selain itu, jika diadakan pelatihan khususnya pelatihan ketrampilan dapat diikuti dengan baik, bertujuan untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat.

### **C. PENUTUP**

Alhamdulillah atas segala kenikmatan serta limpahan rahmat Allah SWT sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat dibutuhkan penulis dan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk keilmuan serta kemajuan dakwah islam di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*. Jakarta: Kencana. 2010
- Basrowi. *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2004
- Direktorat Jendral Cipta Karya. *Bersama Membangun Kemandirian*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2010
- Dwiningrum. Siti Irene Astuti. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka belajar. 2011
- Fadjar Judiono, "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana jalan, Studi kasus peningkatan jalan di Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk" dalam Jurnal Wacana Vo. 12 No. 3 Juli 2009.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta:PT. Bumi Aksara. 2013
- Departemen Agama RI. "Al Qur'an Terjemahan". Jakarta: Depag RI. 2012
- Husaini, Usman. Akbar Seia Purnomo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003
- Kamaluddin. "Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam" Dalam Jurnal Konsep Dasar dan Arah Pengembangan. Vol. VIII. No. 02. Juli 2014
- Kartini Kartono. *Metodologi Reasearch Sosial*. Bandung. 1997
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh*. Jakarta. 2016
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Desa/Kelurahan*. Jakarta. 2016
- Lex J Moeloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

- Rosyda Karya. 1993
- Mardikanto, Totok. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2012
- M. Idrus. *Metode Penelitian Ilmu- ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: UII Press. 2007
- Rukminto Adi, Isbandi. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014
- Sjafari, Agus. Sumaryo. *Pembangunan Masyarakat*. Serang: Fisip Untirta Press. 2012
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta. 2003
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. AlfaBeta. 2009
- Sri Yuniani, Gusti Putri Dhini Rosyida. "Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surabaya" dalam Jurnal Wacana Publik Vo. 1 No. 2 Tahun 2017.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Sutrisna, Loekman. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius. 1995
- Wijayanti Kurnia, Sjamsiar Sjamsudin, Mochamad Rozikin, "Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat" dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 10. Wawancara dengan Ali Ahwan selaku pegawai Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat pada Tanggal 28 Maret 2018
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996
- Soemardjan, Selo dan Soelaiman Soemardi. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1964

Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana. 2007

Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 2002

SS, Khairuddin. *Pembangunan Masyarakat*. Liberty. Yogyakarta. 2000

Suryono, Agus, 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. UM- Press, Jakarta. 2001

Yuwono, Teguh. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Clogapps Diponegoro University, Semarang. 2001

Adisasmita, Raharjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2008

Suharto, Edy. *Membangun dan Memperdayakan Masyarakat*. Rafika Aditama, Bandung. 2005

## LAMPIRAN 1

### Draft Wawancara

#### a. Wawancara dengan aparaturn Kelurahan

1. Apakah aparaturn kelurahan mengetahui tentang program pembangunan lingkungan masyarakat oleh BKM Mukti Jaya?
2. Apakah aparaturn kelurahan ikut mensosialisasikan terkait mekanisme program pembangunan lingkungan masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul?
3. Bagaimana pihak kelurahan menanggapi tentang program tersebut?
4. Apa saja dampak yang di hasilkan dari pelaksanaan program tersebut?

#### b. Wawancara kepada Ketua BKM Mukti Jaya

1. Apa nama BKM ini?
2. Kapan berdirinya BKM Mukti Jaya?
3. Berapa anggotanya?
4. Bagaimana struktur keanggotaan BKM Mukti Jaya?
5. Apa saja ruang lingkup BKM Mukti Jaya?
6. Program apa saja yang telah dilaksanakan oleh BKM Mukti Jaya di Kelurahan Muktiharjo Kidul?
7. Program apa yang dilakukan BKM Muki Jaya dalam pembangunan lingkungan masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul?
8. Bagaimana pelaksanaan program tersebut?
9. Apa saja kendala yang menghambat program tersebut?

#### c. Wawancara dengan masyarakat

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang program pembangunan lingkungan masyarakat oleh BKM Mukti Jaya?
2. Bagaimana respond bapak/ibu tentang program tersebut?

3. Bagaimana dari pihak BKM Mukti Jaya mensosialisasikan tentang program tersebut?
4. Apakah bapak/ibu terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya?
5. Menurut bapak/ibu apa sudah sesuai dengan harapan masyarakat setelah terlaksananya program tersebut
6. Adakah saran dari bapak/ibu untuk program- program BKM Mukti Jaya selanjutnya untuk mensejahterakan lingkungan masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul?

## Lampiran 2

Bersama Ketua BKM Mukti Jaya Kelurahan Muktiharjo Kidul



Rapat Anggota BKM Mukti Jaya Kelurahan Muktiharjo Kidul



Acara RWT (Rembug Warga Tahunan)



Bersama Aparat Kelurahan Muktiharjo Kidul



Bersama anggota Unit Pelaksana Lingkungan (UPL) BKM Mukti Jaya





Bersama Masyarakat

Lokasi di RW 10



Lokasi di RW 23



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 30 / BKM-MJ / XII / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

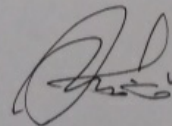
Nama : Drs. Abdul Razaq  
Jabatan : Koordiantor BKM  
Instansi : BKM Mukti Jaya Kelurahan Muktiharjo Kidul  
Alamat : Jl. Tejo Kusumo IV / 28 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota  
Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dany Auliya Fahmi  
NIM : 1601046007  
Fak/Jur : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul “ Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mukti Jaya dalam Pembangunan Lingkungan Masyarakat Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang” sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan 29 November 2020, dan telah membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Semarang, 15 Desember 2020



(Drs. Abdul Razaq)

Koordinator BKM Mukti Jaya

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dany Auliya Fahmi  
NIM : 1601046007  
TTL : Semarang, 16 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Agama : Islam  
Alamat : Madu Sari III RT 02 RW 13 Kel.  
Plamongansari Kec. Pedurungan Kota  
Semarang  
Email : [danyfahmi76@gmail.com](mailto:danyfahmi76@gmail.com)

### PENDIDIKAN FORMAL

2010	1. MI Islamiyah Podorejo Ngaliyan Kota Semarang	LULUS
2013	2. MTs N 1 Semarang	LULUS
	3. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati	LULUS 2016
2020	4. UIN Walisongo Semarang	LULUS

2020

Semarang, 29 Desember

Penulis

Dany Auliya Fahmi

1601046007

